

KUMPULAN SINOPSIS



DI SUSUN OLEH : DENI KURNIAWAN SE

PUSTAKAWAN AHLI MUDA

PERPUSTAKAAN POLITIK PEMERINTAHAN

INSITITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



1. TANGGAL 08 -02- 2023 “DINAMIKA POLITIK DI INDONESIA”

OLEH DENI KURNIAWAN PUSTAKAWAN IPDN

PENGARANG : Dr.H. UNDANG A. KAMALUDIN,M.Ag

MUHAMMAD ARFAN,M.Ag

-Cet.1,--Bandung: Pustaka Setia,2015 220 hlm,16 x 24 cm

Dinamika dan drama politik di Indonesia, dalam sejarahnya hanya didominasi oleh dua aktor utama yang melekat dalam sanubari rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Suharto. Oleh karena itu jejak sejarah yang ditinggalkannya menjadi kajian khusus oleh banyak kalangan sehingga berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus buku yang telah dilahirkan. Tidak bisa dimungkiri bagaimana peran dominan yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto dalam memimpin Negeri ini selama bertahun-tahun. Ada dinamika yang senantiasa diingat dan dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Ironisnya, mendekati masa akhir jabatan Soekarno dan Soeharto memimpin negeri ini bersifat represif dan otoriter meskipun keduanya memiliki jargon politik yang berbeda yang dijadikan alat untuk menekan lawan-lawan politiknya. Soekarno dengan Revolusinya dan Soeharto dengan pembangunannya, atas nama revolusi dan pembangunan itulah keduanya mengekang kebebasan demokrasi yang sesungguhnya sehingga dinamika politik di Indonesia berjalan pincang.

Ada yang menarik untuk di cermati, mengapa reformasi gagal menjalankan agenda perubahan yang telah dicanangkan ? ada yang dinafikan oleh para penggerak reformasi, yaitu memegang kendali setelah jatuhnya sebuah tirani. Padahal, dalam sejarah atau “tradisi” kepemimpinan suatu bangsa, tokoh sentral selau ikut terlibat mengemas dan mengelola pokok-pokok perjuangan yang digulirkan sehingga agenda perjuangan yang ada dalam gempaman yang digulirkan sehingga agenda perjuangan ada dalam gempaman sang tokoh. Demikian pula, ketika kondisi genting yang dialami oleh rezim orde lama, Soeharto langsung memegang kendali keamanan dengan supersemarnya. Sampai akhirnya pada Tanggal 12 Maret 1967 Soeharto diangkat menjadi pejabat Presiden Indonesia oleh MPRS sementara, setahun kemudian, pada Tanggal 27 Maret 1968 Soeharto resmi diangkat sebagai presiden untuk masa jabatan lima tahun pertama.

Adapun pada peristiwa reformasi, tokoh sentral yang melonggarkan turunya rezim orde baru, seperti Amin Rais, Sri bintang pamungkas, dan lain-lain tidak berhasil menguasai keadaan dan tidak berperan langsung mengendalikan kekuasaan. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh para petualang politik yang haus kekuasaan. Bola liar reformasi tidak dapat dikendalikan oleh tokoh tokoh reformasi yang seharusnya saat itu berperan. Akibat dari tidak terkendalinya bola liar reformasi, reformasi tidak menjadi tolak ukur perjuangan memperbaiki nasib bangsa Indonesia, kecuali hanya “ alat” untuk menumbangkan orde baru. Oleh karena itu buku ini mencoba memaparkan secara gamlang dinamika perjalanan politik di Indonesia sejak kekuasaan orde lama dan orde baru hingga Pasca – reformasi.



2.PENGANTAR ILMU KEPENDUDUKAN

OLEH DENI KURNIAWAN,SE PUSTAKAWAN IPDN

PENGARANG : SAID RUSLI

Jakarta : LP3ES, 2012

viii + 239 hlm,,: 15,5 x 23 cm

Pada edisi baru ini, struktur buku ini ditambahkan satu bab yaitu mengenai “ kualitas hidup, indeks mutu hidup, dan indeks pembangunan manusia (Bab 14) topik ini sangat relevan dipelajari sebagai bagian dari ilmu kependudukan. Buku ini juga di lakukan berbagai “penyempurnaan” antara lain dengan penambahan data baru dari berbagai sumber seperti hasil sensus penduduk dan berbagai publikasi data statistik serta contoh atau ilustrasi yang relevan.

Studi kependudukan (population studies) merupakan istilah lain bagi ilmu kependudukan yang digunakan saat ini. Studi kependudukan terdiri dari analisis-analisis yang bertujuan dan mencakup :

1. Memperoleh informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik dan perubahan-perubahannya.
2. Menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut,dan

3. Menganalisis segala konsekuensi yang mungkin sekali terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan-perubahan itu.

Demografi adalah studi ilmiah terhadap penduduk manusia, terutama mengenai jumlah, struktur dan perkembangannya sementara Bogue memberikan batasan sebagai berikut:

Demografi adalah studi matematik dan statistik terhadap jumlah, komposisi dan distribusi spesial mengenai penduduk manusia, dan perubahan –perubahan dari aspek –aspek tersebut yang senantiasa terjadi sebagai akibatnya ilmu proses yaitu fertilitas, moralitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

Demografi dapat dilihat dalam makna yang sempit, dalam hal ini sama dengan analisis demografi atau dalam makna yang luas mencakup baik analisis demografi maupun studi kependudukan. Pemisahan antara studi kependudukan dan analisis demografi umpunya telah dilakukan oleh Hauser yang menyatakan bahwa :

1. Analisis demografi merupakan analisis statistik terhadap jumlah, distribusi dan komposisi penduduk, serta komponen-komponen variasinya dan perubahan sedangkan,
2. Studi kependudukan mempersoalkan hubungan antar variabel demografi dan variabel dari sistem lain.

Dalam buku ini juga di bahas beberapa ukuran dasar teknik analisis kependudukan, sejarah perkembangan penduduk: dunia dan Indonesia, sumber-sumber dana kependudukan, komposisi dan piramida penduduk, Mortalitas, tabel kematian dan metode menentukan tingkat kematian, Fertilitas, angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, pengangguran dan kesempatan kerja, gerakan penduduk dan urbanisasi, penduduk, lahan,pangan,revolusi hijau dan kemiskinan, proyeksi penduduk, kebijakan kependudukan dan keluarga berencana, kualitas hidup, indeks mutu hidup, dan indeks pembangunan manusia.



3. TANGGAL 09-02-2023 “ PENGANTAR KONSELING DAN PSIKOTERAPI” ED 2

Pengarang : Andi Mappiare AT

Oleh : Deni Kurniawan, SE Pustakawan IPDN

_Ed.2-8,- Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Xvi, 190 hlm, 21 cm.

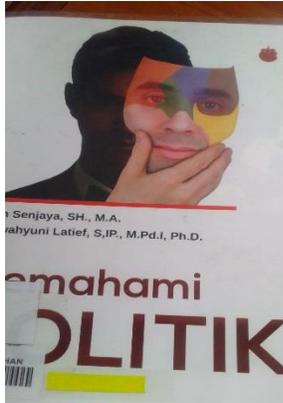
Buku ini merupakan buku yang berisi informasi dasar dalam hal pengetahuan konseling dan psikoterapi, sifat bahasa buku ini terutama bertolak pada tiga pokok kerangka pikiran: (1) psikologi belajar, (2) metodologi pengajaran, dan (3) etika penyajian informasi. Prinsip-prinsip psikologi belajar tersirat dalam sifat informasi dari mudah (pada bab –bab awal) kesukar/kompleks (pada bab-bab akhir) secara berangsur-angsur. juga, ada bahasan-bahasan bersifat uji-keingintahuan dan uji-percaya diri pembaca (tantangan), diantara bahasan-bahasan yang mendatangkan rasa mampu / berhasil pembaca memahami isi (ganjaran) pada beberapa bagian bahasan. Prinsip-prinsip metodologi pengajaran tersirat dalam sifat bahasan yang analisis induktif, sedikit sintesis dalam kesimpulan. Kegiatan-kegiatan analisis lanjut, sintesis ulang, dan penyimpulan lebih final pada beberapa konsep, konstruk, dan teori, dihadapkan mahasiswa, diharapkan mahasiswa melakukan dalam kegiatan-kegiatan penulisan laporan mingguan, penulisan

makalah, diskusi kuliah, dan tugas-tugas terstruktur lain (dalam kerangka CBSA) prinsip-prinsip etika penyajian informasi tersirat terutama pada penggunaan rujukan, acuan, dan sumber petikan yang kebanyakan sumber asli.

Atas sejumlah pertimbangan prinsip dan teknis. Dalam edisi kedua ini dilakukan revisi dalam beberapa bagian dari pengantar konseling dan psikoterapi. Bagian-bagian yang dimaksud adalah pertama, penambahan “peristiwa utama” dalam sejarah konseling selama pada abad ke 20 pada Bab II; kedua, pembaharuan teks dan kepustakaan pada Bab III; ketiga, penambahan satu bab pada akhir buku, yaitu paradigma dan ancangan konseling pada Bab IV keempat; penggantian kode etik profesi bimbingan dan konseling pada lampiran II, terakhir, penambahan daftar pustaka.

Buku ini juga membahas pengantar pemahaman konseling, hakikat perkembangan, ekspektasi dan tujuan, aspek psikologis dalam konseling diantaranya membahas perkembangan dalam masalah klien, pribadi dan keterampilan konselor. Paradigma dan ancaman konseling.

Konseling dan psikoterapi merupakan suatu usaha profesional untuk membantu/ memberikan layanan pada individu-individu mengenai permasalahan yang bersifat psikologis. Dengan kata lain konseling dan psikotrapi bertujuan memberikan bantuan kepada klien untuk suatu perubahan tingkah (behauioral change), kesehatan mental positif (positive mental health) pemecahan masalah (problem solution), keefektipan pribadi (personal effectiveness) dan pembuatan keputusan (decesion making) dengan demikian seorang konselor perlu didukung oleh pribadi dan keterampilan yang dapat menunjang keefektipan konseling.



4. Tanggal 09-02-2023 “ MEMAHAMI POLITIK”

Pengarang : Burlian Senjaya,SH.,M.A.

Suryawahyuni Latief,S,IP.,M.Pd.I, Ph.D.

Oleh : Deni Kurniawan,SE Pustakawan IPDN

Penerbit : Manggu Makmur Tanjung Lestari 2019

162 hlm.; 14,5 cm x 20,5 cm

Penulis buku ini sebagai entuk dedikasi penulis terhadap keilmuan penulis, memberiakan kontribusi terhadap pemikiran dan pengetahuan mengenai politik, sistem politik, sosialisasi politik, budaya politik, partisipasi politik, pemerintahan birokrasi dan kelompok kepentingan mahasiswa akademisi. Politik adalah merupakan seni atau segala sesuatu yang menunjukkan adanya suatu hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama dalam suatu hubungan yang di sebut aturan, wewenang, dan kekuasaan. Terdapat lima pandangan dalam memahami politik yaitu pandangan klasik , pandangan kelembagaan, pandangan kekuasaan, pandangan fungsionalisme, dan pandangan komplik.

Dari segi metodologi, kelima pandangan di kelompokkan menjadi tradisionalisme dan behavioralisme. Ilmu politik tradisionalisme memandang gejala politik dari segi normatif dan menganggap tugas ilmu politik untuk memahami dan memberikan gejala politik,

bukan menjelaskan apalagi memperkirakan apa yang apa terjadi serta melihat politik sebagai perwujudan tujuan masyarakat- negara.

Sistem politik merupakan keseluruhan unit atau bagian politik yang saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mempengaruhi proses politik yang terdiri dari input, proses, dan output. Ciri utama dari sistem politik adalah ciri identifikasi, input dan output, diferensiasi dalam suatu sistem dan integrasi dalam suatu sistem. Input terdiri atas input tuntutan dan dukungan input merupakan energi bagi suatu sistem politik dan juga sekaligus merupakan sumber informasi yang berharga bagi para pengambil keputusan politik, output dari suatu sistem politik dalam berwujud pada suatu keputusan atau kebijakan umum.

Sosialisai politik merupakan hal penting dalam suatu kehidupan berpolitik disuatu negara atau pada suatu sistem politik suatu negara karena melalui sosialisasi politik, warga negara atau individu yang menetap di suatu wilayah negara dapat mempelajari politik secara langsung maupun secara tidak langsung , dan secara sadar maupun tidak sadar. partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut aktif dalam kehidupan politik. Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang di pegang secara bersama sebuah orientasi terhadap obyek-obyek politik.

Pemerintahan adalah suatu organisasi terbesar yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, menjalankan dan menyelenggarakan kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, dengan memiliki beberapa badan atau kekuatan baik kekuatan finansia, hukum, perundang-undangan, angkatan perang dan bentuk kekuatan yang lainnya untuk memaksa, memonopol, memerintah, dan menguasai segala sumberdaya yang dimiliki dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai anggotanya. Partai politik adalah kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan teknologi tertentu dan yang berusaha mencari mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Sistem pemilu merupakan sebuah rekayasa pemilu dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. salah satu tujuan pemilu adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif.



5. Tanggal 15-02-2023

'REALISASI PEMERINTAHAN DESA DAN SUPRADESA DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN DESA'

Pengarang : Umar Nain, S.Sos, M.Si

Oleh : Deni Kurniawan, SE

Penerbit : Pustaka Pelajar

Cet I, Desember 2017

Bahwa komitmen pemerintah untuk membangun desa perlu diapresiasi dengan baik sebagaimana tercantum dalam " NAWACITA", pada urutan ketiga yaitu " Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa upaya untuk memperkuat desa-desa di Indonesia maka pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar melalui kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan desa yang bersumber dari APBN, sebagai etas dari reformasi penganggaran desa sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. pengalokasian anggaran desa yang dikenal dengan Dana Desa diprediksi akan meningkat sampai tahun 2019, sebagai gambaran bahwa untuk Dana Desa (DD) mulai tahun 2015 sudah mencapai 20,7 triliun rupiah dan sampai tahun 2019 mencapai 111,8 triliun rupiah, hal ini belum termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Restibusi Daerah (BHPRD) yang kesemuanya di peruntukan bagi 74.754 desa di Indonesia. Perkembangan anggaran pembangunan desa yang meningkat dari tahun

ketahuan memerlukan perencanaan yang sistimatis, efisien dan efektif. Selain perencanaan perlujuga di dukung pengolahan anggaran yang terarah, tertib, disiplin dan akuntabel karena baik perencanaan maupun faktor determinan dengan pembangunan desa.

Pembahasan dalam buku ini akan di uraikan dalam setiap bab.

Bab I Pemerintahan Desa pengertiannya adalah pemerintahan, yang didalamnya diuraikan tentang pemerintahan sebagai suatu kebutuhan, asas-asas pemerintahan dan tugas pokok pemerintahan. Pengertian desa secara teoritik dan legistik serta asas dan tujuan pengaturan mengenai desa. didalam bab ini juga dibahas tentang penegertian pemerintahan desa yang menjelaskan mengenai kelembagaan desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa, kedudukan dan fungsi pemerintahan desa. Termasuk pembahasan tentang keembagaan desa baik lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat, kerjasama antar desa dan badan usaha milik desa. serta pembahasan terakhir dalam bab ini di jelaskan mengenai pemerintahan supradesa yang berperan dalam fungsi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bab II Relasi pemerintahn desa dan Supradesa. Diawali dengan pembahasan relasi dalam bidang kewenangan dan dasar pelaksanaannya, baik kewenangan asal usul maupun kewenangn berskala desa yang diuraikan secara terperinci sesuai ruang lingkup dan bidang kewenangan. Dalam bab ini juga dibahas pula mengenai relasi dalam bidang keuangan yang berhubungan dengan dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan restibusi daerah, pembahasan relasi dalam bidang pembinaan dan pengawasan diuraikan peran pemerintahan supradesa dalam pembinaan dan pengawasan, fasilitasi dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Diakhir bab ini juga di bahas relasi dalam bidang perencanaan dan pembangunan desa, yang didalamnya di uraikan tentang pedoman pembangunan desa baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dalam pembangunan desa.

Bab III Perencanaan Pembangunan Desa. Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertiannya perencanaan dan perencanaan pembangunan desa. Diuraikan pula pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politis, teknokratis partisipatif, atas-bawah

dan bawah-atas beserta jenis jenis perencanaan desa (RPJM Des dan RKP des) termasuk unsur pemeran dalam perencanaan desa dan siklus perencanaan pembangunan desa. Pada bagian akhir bab ini dijelaskan tentang pelaksanaan ,monitoring perencanaan pembangunan desa, baik dari peran pemerintahan maupun keterlibatan masyarakat desa.

Bab IV Teknis Penyusunan RPJM Desa. Pada bagian ini di jelaskan pengertian RPJM Desa, maksud dan tujuan disusunnya RPJM Desa serta dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Desa. Secara teknis diuraikan pula mekanisme penyusunan RPJM Desa di mulai dari visi misi kepala desa, penggunaan alat kajian seperti sketsa desa (PETA DESA), bagian kelembagaan dan kalender musim, identifikasi masalah, peringkat masalah, dan peringkat tindakan pemecahan masalah untuk tersusunnya RPJM Desa dalam jangka waktu 6 tahun sesuai masa jabatan kepala desa.

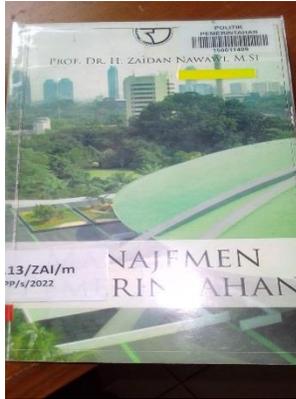
Bab V Teknik Penyusunan RKP Desa. Didalam bab ini di jelaskan tentang pengertiannya dan tujuannya serta manfaat RKP Desa, bahan-bahan yang diperlukan yang menjadi pendukung RKP Desa di bagian akhir diuraikan secara teknis mekanisme penyusunan RKP Desa dilihat dari proses, tahapan, perubahan dan pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bab VI Penganggaran Desa di dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian anggaran, prinsip dan fungsi penganggaran serta jenis-jenis penganggaran selain itu juga diuraikan perkembangan penganggaran desa sampai tahun 2019 yang bersumber dari apbn dan alokasi dana desa serta bagai dari pajak dan restribusi daerah yang kesemuanya terintegrasi penganggarnya dalam APBD Desa.

Bab VII Kebijakan dan Implementasi Alokasi Dana Desa pada bab ini di uraikan mengenai kebijakan pemerintahan yang mendasari adanya Alokasi dana desa. Pembahasan berikutnya tentang pengertian alokasi dana desa, maksud dan tujuan serta prinsip-prinsip pelaksanaan alokasi dana desa, di jelaskan pula penggunaan rumus- rumus dan penentuan perhitungan besaran alokasi dana desa dan implementasinya disertai pula dengan penggunaannya di daerah.

Bab VIII Pengelolaan Dana Desa didalam bab ini juga di jelaskan mengenai pengertian dana desa, pengelolaan dana desa, penggunaan dana desa pada tahun 2015 dan tahun 2016 secara prioritas penggunaan dana desa serta mekanisme pelaporan pemantauan serta evaluasi dana desa.

Bab IX pengelolaan keuangan desa pembahasan diawali dengan pengertian keuangan desa, dasar hukum keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dan diakhir bab di bahas pula tahapan kegiatan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. serta di bab X merupakan bagian akhir menjelaskan tentang keberlanjutan perencanaan dan penganggaran desa, serta implikasinya terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat desa dan kemandirian desa.



6. Tanggal 16-02-2023 “ MANAJEMEN PEMERINTAHAN”

Pengarang : DR. H. ZAIDAN NAWAWI, M.Si

Oleh : Deni Kurniawan, SE

-Ed. 1,- Cet.2 – Jakarta:Rajawali Press, 2015

Viii, 214 hlm, 21 cm. Bibliografi : hlm. 205

ISBN : 978-979-769-582-8

Pemerintahan sebagai sebuah ilustrasi yang melayani kebutuhan publik, sangat penting untuk senantiasa suatu mekanisme-mekanisme baru untuk dapat menghasilkan kinerja yang maksimal terhadap pelayanannya kepada masyarakat pengguna jasa. Orientasi yang berubah, menjadi stimulus yang kuat, terkait fungsi pemerintahan sebagai agen yang melakukan fungsi perubahan bagi masyarakat, sekaligus juga bertugas untuk menerima perubahan yang terdapat di masyarakat yang merupakan dampak dari perkembangan paradigma pelayanan akuntabilitas publik yang berkembang secara global.

Dalam melakukan perbaikan birokrasi pemerintah sebagai bagian dari organisasi dan manajemen pemerintahan, perlu dilakukan upaya – upaya perbaikan berupa pembaharuan manajemen dengan prinsip-prinsip wirausaha antara lain; pemerintahan katalis, pemerintahan milik masyarakat, pemerintahan yang di gerakkan oleh misi,

pemerintahan yang berorientasi kepada pelanggan, pemerintahan wirausaha, pemerintahan yang antisipatif, pemerintahan yang terdesentralisasi, dan pemerintahan yang berorientasi pasar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah komitmen dan konsistensi serta strategi yang jelas dalam upaya memperoleh model yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan perkembangan paradigma pelayanan publik yang terkadang menjadi suatu yang lebih cepat dari kemampuan responsivitas yang memiliki mekanisme dan sistem yang bersifat hirarkis dan terbatas.

Di bab I Pokok-pokok Pengertian dan tujuan, diawali dengan uraian pengertian manajemen, fungsi dan tujuan, selanjutnya diuraikan pula pengertian pemerintahan, pengertian pemerintahan manajemen, tujuan pemerintahan dan sejarah singkat perkembangan ilmu manajemen.

Bab II Konsep Manajemen Publik di bab ini dijelaskan tentang fungsi pokok manajemen, tingkatan manajemen, orientasi manajemen, manajemen kinerja, manajemen publik baru, dan di akhir bab ini diuraikan tentang implementasi new public management (NPM).

Bab III Konsep Organisasi Birokrasi dalam bab ini menjelaskan tentang konsep birokrasi, pengertian birokrasi, konsep organisasi, konsep administrasi dan di akhir bab ini diuraikan pula tentang segitiga administrasi, organisasi dan manajemen. serta peran dan fungsi birokrasi dalam implementasi kebijakan.

Bab IV Perilaku Organisasi Birokrasi dalam bab ini menjelaskan tentang konsep perilaku birokrasi, konsep budaya birokrasi, lingkungan organisasi, tingkah laku individu dan motivasinya, kepemimpinan, ancaman patologi birokrasi, dan perubahan dalam kebutuhan.

Bab V Manajemen Kewenangan Pemerintahan dalam bab ini diuraikan tentang manajemen di tingkat negara, manajemen di tingkat pemerintahan, manajemen kewenangan di negara kesatuan, delegasi kewenangan, manajemen pemerintahan pusat, kewenangan pemerintahan provinsi dan yang terakhir di bab ini menjelaskan tentang kewenangan kabupaten/ kota.

Bab VI Reformasi Manajemen dalam bab yang terakhir dibuku ini menguraikan tentang reformasi birokrasi, reformasi administrasi publik, perubahan manajemen, perubahan perilaku birokrasi, efisiensi dan efektifitas pemerintahan dan manajemen e-goverment dan yang terakhir menjelaskan tentang good publik manajemant.



7. Tanggal 16-02-2023 “KEARIFAN LOKAL, BUDAYA DAN PEMIMPIN PERUBAHAN”

Pengarang: Wustari L Mangundjaya

Oleh : Deni Kurniawan,SE

- Ed, 1 – Cet. 1, Graha ilmu, 2019

x + 84 hlm, 17 x 24 cm

ISBN : 978-623-228-241-4

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, dengan perkataan lain merupakan suatu keniscayaan. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan yang menjadikan sebagai suatu pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suatu bangsa yang ada di daerah tersebut. Budaya adalah sebuah ciri atau identitas dari sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu. Budaya timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang yang akan

membentuk suatu kebiasaan dan pada akhirnya menjadi sebuah budaya dari masyarakat itu sendiri.

Sebagai negara yang sedang berkembang hal ini juga memerlukan suatu organisasi yang berkembang, pengembangan organisasi yang dilakukan biasanya tidak lepas dari adanya perubahan organisasi. Perubahan organisasi memerlukan seorang pemimpin perubahan yang dapat memimpin serta mengarahkan perubahan organisasi, untuk dapat memimpin secara efektif, pemimpin disuatu organisasi tidak dapat melepaskan diri dari budaya lokal setempat hal ini seorang pemimpinperubahan juga harus memahami kondisi budaya setempat masing- masing.

Buku ini bertujuan untuk mempetroleh profil karakterlistrik budaya serta preferensi pemimpin perubahan berdasrkan hasil penelitian di berbagai kota dan suku bangsa di indonesi. Buku ini juga merupakan edisi pertama yang membahas mengenai berbagai karakterlistrik budaya dari berbagai suku bangsa yang terdapat di jawa (Yogyakarta, Surakarta, Semarang dan Surabaya) dan Bali yang akan di ikuti dengan pembahasan pada berbagai budaya lainnya.

Dalam buku ini ada tujuh bab yaitu bab I membahas tentang kearifan lokal, bab II akan membahas mengenai pemimpin perubahan, bab ke III membahas tentang kearifan budaya masyarakat Yogyakarta dan pemimpin perubahan, bab IV membahas mengenai kearifan budaya masyarakat Surakarta dan pemimpin perubahan, bab V membahas mengenai kearifan budya masyarakat Semarang dan pemimpin perubahan, bab VI membahas mengenai kearifan budaya masyarakat Surabaya dan pemimpin perubahan dan yang terakhir bab VII membahas mengenai kearifan budaya masyarakat bali dan pemimpin perubahan serta diikuti dengan penutup.

8. Tanggal 20-02-2023

“ SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SANRI)



Pengarang : Drs. H. Inu Kencana Syafie,M.Si

Oleh : Deni Kueniawan, SE

Cet, 12. Bumi Aksara, 2019

Viii + 172 hlm,15,5 x 23 cm

ISBN : 978-979-526-867-3

Sejak berubahnya suasana pemerintahan pascareformasi dewasa ini, dan diamandemennya UUD 1945 oleh MPR RI periode 1999-2004 maka begitu banyak perubahan di Indonesia termasuk perubahan dalam administrasi negara, dalam pembahasan dalam buku ini ada 10 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan dalam bab ini diuraikan tentang pengertian sistem menurut para ahli, pengertian tentang administrasi, pengertian negara, dan ada empat syarat untuk membuat negara 1) adanya wilayah, 2) adanya pemerintahan, 3) adanya rakyat, 4) adanya kedaulatan negara. Diuraikan pula tentang timbulnya negara, bentuk negara. Kemudian untuk melihat berbagai bentuk pemerintahan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem pemerintahan kabinet presidensial

2. Sistem pemerintahan kabinet parlementer
3. Sistem pemerintahan kabinet campuran
4. Sistem pemerintahan kabinet komunis.

Bab II

menjelaskan tentang pengertian administrasi negara menurut para ahli, lebih spesifik dibicarakan administrasi negara dalam berbagai paradigma, baik yang berinduk kepada ilmu administrasi negara maupun yang berinduk kepada ilmu politik dan bertumpah tindh dengan ilmu pemerintahan.

Bab II menguraikan tentang posisi dan letak ilmu administrasi nagara itu sendiri, baik sesama ilmu-ilmu kenegaraan maupun terhadap ilmu-ilmu sosial lain non kenegaraan agardiketahui ketumpangtindhnya sebagaimana dituntut pada bab sebelumnya.

Bab IV Pemerintahan Indonesia dalam bab ini keberadaan pemerintahan indonesia diuraikan dalam bab ini sebelum kemerdekaan. Orde lama yang bermula dari keluarnya Bung Hatta keluar dari kabinet, baru yang berakhir dengan kejatuhan Soeharto, sampai pada orde reformasi yang penuh dengan kritis sebagai akibat pemerintahaan sebelumnya, dan ketidak mampuan pemerintahan baru yang mereformasi.

Bab V Keberadaan birokrasi pemerintahan indonesia diuraikan dalam bab ini mulai dari organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, dan administrasi pemerintahan.

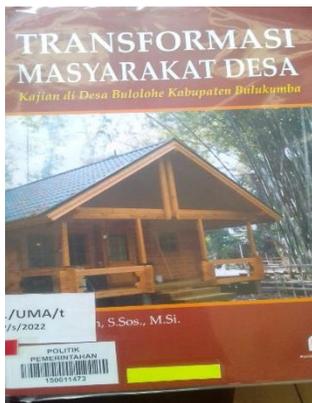
Bab VI Khusus untuk lembaga eksekutif sebagai kelanjutan bab sebelumnya, dibahas kejaksan agung, Bank Indonesia, Kementrian serta lembaga pemerintahan non departemen.

Bab VII Perkembangan perubahan pemerintahan daerah dibicarakan dalam bab ini mulai dari sejarahnya sampai pada keberadaan lembaga eksekutuf dan legislatif yang mulai berubah paskareformasi dewasa ini.

Bab VIII Untuk mengetahui berbagai kelemahan kepemimpinan pemerintahan indonesia dibicarakan terlebih dahulu berbagai gaya,teknik, variable,teori, dan akhirnya di tutup dengan filsafat pemerintahan itu sendiri.

Bab IX berbagai penolakan dunia dalam era globalisasi yang serba mendunia ini dimasukkan dalam bab ini karena Indonesia tampak terkalahkan oleh kemajuan teknologi, sementara republik ini hanya memperbesar utang dari tahun ketahun yang beresiko masuknya pemikiran negara lain ke sumbu tulang belakang administrasi negara Indonesia.

9. Tanggal 21-02-2023 “ TRANSFORMASI MASYARAKAT DESA” kajian di desa Bulolohe Kabupaten Bulukumba”



Pengarang : Umar Nain

Oleh : Deni kurniawan,SE

Cet I , Desember 2021

Penerbit : Pustaka Pelajar

ISBN : 978-623-236-238-3

Buku ini hasil penelitian penulis yang dilaksanakan pada 2021 dengan lokus penelitian di Desa Bulolohe merupakan desa korporatis yang dibentuk pada masa orde baru, telah mengalami transformasi sosial karena adanya berbagai program dan kegiatan pembangunan yang diintroduksi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa yang dilaksanakan di desa bulolohe telah menciptakan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam buku ini tidak semua perubahan yang terjadi menjadi subyek kajian, akan tetapi dibatasi pada perubahan dalam aspek sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi desa,.

Selain itu transformasi sosial yang berlangsung dalam masyarakat menimbulkan implikasi sehingga perubahan yang terjadi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transformasi sosial budaya tampak dari perkembangan politik masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, berkembangnya mata pencaharian masyarakat diluar sektor pertanian, tradisi dan budaya masyarakat tetap dipelihara dan di pertahankan serta berkembangnya kehidupan beragama mulai dari anak-anak hingga orang dewasa di Desa Bulolohe.

Selain aspek sosial budaya maka dengan aspek politik dapat dilihat dari tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam musrembang, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam aspek ekonomi terjadi perubahan dari ekonomi subsisten menjadi ekonomi komersial yang berorientasi pasar. Desa mengalami kapitalisasi sehingga relasi sosial masyarakat mengalami perubahan berdasarkan relasi untung rugi. Untuk aspek teknolog, terjadi perubahan dari penggunaan tenaga hewan menjadi tenaga mesin yang disatu sisi dapat membantu meringankan beban manusia namun disisi lain terjadi marginasi tenaga kerja perempuan di Desa Bulolohe. Pada bagian akhir buku ini dibahas pula dukungan infrastruktur desa dan kelembagaan desa /supradesa dalam transformasi sosial masyarakat di desa bulolohe yang kesemuanya telah di rangkum.

Dalam pelaksanaan kajian transformasi sosial di desa bulolohe maka ada beberapa aspek yang di rekomendasikan kepada pemerinthan desa dan masyarakat, yaitu :

1. Aspek sosial budaya.
 - a. Di sektor pendidikan di temukan adanya pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) yang tidak merata untuk setiap dusun dari 5 dusun di Desa Bulolohe yang memiliki PAUD / TK hanya dusun Paruku. Untuk tercapainya pemeratan pendidikan setingkat PAUD/TK hendaknya pemerintah Desa mengalokasikan dana APBD Desa untuk pembangunan PAUD/ TK , untuk menampung anak-anak dari dusun Bulolohe itu sendiri.

- b. Untuk meningkatkan derajat kesehatan lingkungan yang lebih berkualitas hendaknya setiap rumah tangga di desa Bulolohe tidak membuang sampah sembarangan

2. Aspek Politik.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk setiap pelaksanaan pemilihan langsung kepala desa, pemilihan kepala desa, pemilihan legeslatif dan pemilihan Presiden hendaknya dilakukan sosialisasi terkait dengan upaya membangun kesadaran politik masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk setiap pemilihan langsung di desanya.

3. Aspek Ekonomi.

- a. Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani sawah maka kebiasaan petani menjual gabah di pematang sawah perlu dievaluasi, karena petani tidak dapat mendapatkan nilai tambah dari hasil penjualan gabahnya.
- b. Untuk meningkatkan daya tawar petani sayur mayur terhadap fluktuasi harga yang tidak menentu maka pemerintahan desa perlu membangun secara sederhana tempat pelelangan sayur mayur tidak dirugikan oleh pedagang pengepul.

4. Teknologi

- a. Untuk menghindari menurunnya kesuburan tanah sebagai konsekuensi penggunaan pupuk lorganik secara terus menerus pada lahan pesawahan, maka petani perlu dibimbing dan diorientasikan agar secara bertahap mengurangi penggunaan pupuk organik .
- b. Untuk menghidupkan benih padi varietas unggul, yang dianjurkan dalam program revolusi hidup melalui intensifikasi pertanian.



10. Tanggal 27-02-2023 “ KEBEBASAN POLITIK” Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik.

Pengarang : Dr. Thomas Token Pureklolon,M.Ph.,MM.,M.Si.

Penerbit : Pustaka Obor Indonesia.Cet Pertama, Desember 2021

Xviii + 181 hlm;15 x23 cm.

Ruang publik (forum externum) dalam tindakan politik sudah dengan sendirinya teridentifikasi dalam tiga varian utama yakni kehendak bebas, kemampuan untuk melakukan pengadaptasian, dan kondisi internal dari siapa pun penguasanya. Ketiga poin ini secara inheren terserap dalam budaya kehidupan yang tak pernah absen dari sosok penguasa politik dalam kebiasaan politiknya (political freedom).kebebasan politik dalam aksentuasinya telah mencapai titik tertinggi dalam sebuah negara karena melampaui ciri- ciri kebebasan dan jenis-jenis kebebasan “yang diterima dan dipahami terlalu demokratis “ atas sebuah kebiasaan yang hendak diberlakukan dalam sebuah negara. Kebebasan harus ada batas demarkasinya ketika berhadapan dengan sebuah sistem dalam masyarakat. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang anggotanya bisa di ajak berpikir di tengah kebebasan kendati demokrasi politik berakar pada kebebasan (fredom) itu sendiri.

Buku ini terdiri dari empat bagian yang masing-masing penulis menguraikan secara gamlang sebagai berikut :

Bagian pertama, berisi eksistensi dan kebebasan politik, dengan rekanan utamanya adalah argumentasi teori-teori tentang kebebasan politik; yang bermula pada demokrasi dengan sistem pemerintahan dimana demos (rakyat) selalu berdaulat dalam politik di sebuah negara. Demokrasi bertumpu pada kebebasan dan akar dari demokrasi adalah freedom (kebebasan) terminologi kebebasan dalam linguistic descriptive adalah sangat terikat pada makna teks yang sering dinakan kebebasan makna positif dan makna negatif, sebaiknya terminologi kebebasan dalam (political linguistic) adalah sangat tergantung pada konteks yang dimaknai secara bersama (totum) dalam ruang kepentingan privat (forum internum “ diantara pihak yang berpegang teguh pada makna temporal atas hasil kesepakatan dan konsensus.makna kebebasan dalam politico linguistic ini selalu terjalin diantara individu, atau individu dengan kelompok partai politik tertentu, atau antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Kebebasan partai politik dengan model kedua ini terjadi secara berkesinambungan dalam dunia perpolitikan yang terus dilihat pada setiap praktek politik yang terjadi. Pada bagian ini pun terdapat sebagai konsep dan teori kebebasan yang secara progresif di bahas dengan berbagai aksentusinya sejak regim orde lama, orde baru yang terlihat dalam sentra kekuasaan secara historis, akhirnya sampai orde reformasi yang “ semuanya serba bebas” dalam kebebasan berpolitik. Kebebasan berpolitik juga mengandung resiko dan bermasalah seperti terjadi di Syria dan Korea Utara yang penuh dengan diskriminasi dan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Dengan kata lain, eksistensi kebebasan berpolitik menjangkau juga free will atau kehendak bebas dan penentuan nasib sendiri yang terus di perjelas dengan moral dan etika sebagai penjaga gawang dalam suatu masyarakat.

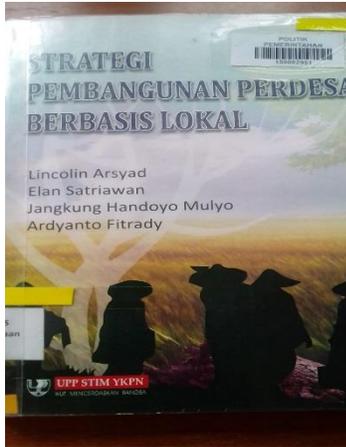
Bagian kedua, membahas tentang kebebasan berpolitik dari berbagai dimensi yang berfirmasi pada aspek-aspek utama yang berpengaruh langsung pada kebebasan politik itu sendiri seperti : **Aspek ideologi** yang selalu hadir dalam bentuk paham , cara berpikir, dan sebagai alat pengikat dari berbagai keberagaman yang khas seperti, budaya, etnis, bahasa, agama, dan sebagainya. **Aspek sosial** yang berkaitan dengan masyarakat

terutama sifat- sifat kemasyarakatan yang terus memperhatikan kepentingan umum dan mengarah pada aktivitas sosial politik pada ruang publik (forum exterum). **Aspek Ekonomi** yang terus dipandang sebagai titik kunci yang menentukan kebebasan politik. **Aspek budaya** dimana seluruh anggota masyarakat bergantung satu sama lain berdasarkan rasa solidaritas yang tinggi akibat adanya persamaan latar belakang sejarah, politik, maupun kebudayaan. **Aspek Teologi**, aristoteles adalah filsuf pertama yang menganggap bahwa teologi adalah sebagai sebuah disiplin, sekaligus mengidentikkan dengan filsafat pertama, yang tertinggi dari semua ilmu teoritis, yang merupakan suatu studi yang kemudian dinamakan metafisika. **Aspek pertahanan dan keamanan**, kebebasan berpolitik selalu berdasarkan pandangan dan ideologi bangsa indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang dasar Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 untuk mencapai pertahanan dan keamanan yang solid digunakan prinsip yang bebas aktif, perdamaian dunia serta kemerdekaan dan kedaulatan. **Aspek Antropologi**, antropologi politik adalah suatu bidang yang menggabungkan unsur-unsur sains politik dan antropologi.

Bab III dalam buku ini, secara konferhensif membahas secara substansial tentang kebebasan politik dan sekularisasi dengan menilik korelasi antara kebebasan politik dan sekularisasi yang berkembang dewasa ini dalam aktivitas politik. Menurut Aristoteles politik merupakan master of science yaitu kunci untuk memahami lingkungan melalui pengetahuan politik.

11. Tgl 09-03-2023 “STRATEGI PEMBANGUNAN PERDESAAN BERBASIS LOKAL”

Pengarang : Lincolin Arsyad, Elan Satriawan, Jangkung Handoyo Mulyo dan Ardyanto Fitrady.



Cet Pertama, April 2011

Penerbit : Unit Penerbit Percetakan STIM YKPN Yogyakarta

XII + 290 hlm, 19 x 24 cm

ISBN :978-979-3532-46-2

Dalam proses penyelesaian naskah akademik tersebut kami menemukan kenyataan bahwa begitu terbatasnya dokumentasi proses pembangunan perdesaan di Indonesia dan kajian –kajian ilmiah yang mefokuskan pada isu-isu seputar kondisi sosial ekonomi pedesaan. Kenyataan ini memprihatinkan untuk, paling tidak, tiga alasan,. Pertama, data menunjukkan bahwa hingga saat buku ini di tulis, wilayah perdesaan masih relatif lebih besar ketimbang wilayah perkotaan di indonesia. Kedua, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan juga masih sedikit lebih besar ketimbang mereka yang tinggal di daerah perkotaan _ walaupun dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk perkotaan tumbuh begitu pesat. Ketiga, diskursus mengenai maslah-maslah sosial ekonomi di wilayah perkotaan selalu merujuk, salah satunya, pada permasalahan urbanisasi yang

akar masalahnya adalah ketertinggalan wilayah perdesaan ketimbang wilayah perkotaan.

Keprihatian tersebut mendorong kami untuk menjadikan kajian ini bukan hanya dapat diakses oleh mereka yang membaca naskah RPJMN 2010-2014, namun juga oleh khalayak yang lebih luas baik dari kalangan akademik maupun umum, khususnya mereka yang memiliki ketertarikan pada isu-isu seputar pembangunan perdesaan. Kami meyakini bahwa pembangunan perdesaan dan masalah yang terkait dengan nya sendiri masih akan menjadi isu yang strategis dan relevan dalam kajian akademik maupun penyusunan kebijakan pembangunan diindonesia ke depan. Dengan demikian, harapan kami, diterbitkan kajian ini akan menambah khasanah literatur dalam ruang lingkup pembangunan perdesaan dan isu-isu yang terkait dengannya. Kajian ini merupakan potret atas kondisi wilayah perdesaan di indonesia. Perspektif yang digunakan adalah spesial – komparatif dimana kami membandingkan kondisi-kondisi wilayah perdesaan ditujuh wilayah utama indonesia: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi , Maluku dan Papua. Indikator-indikator utama yang digunakan pada kajian ini selain kondisi geografis-geografis juga menyangkut pada kondisi infrastruktur fisik, infrastuktur soaial dan ekonomi, potensi sosial; dan ekonomi dan beberapa indikator lainnya.

Dalam buku ini ada pembahasan di bab II, yaitu tentang pembahasan pembangunan pedesaan, masalah-masalah pokok perdesaan, kendala-kendala pembangunan, perubahan paradigma pembangunan dan pembangunan perdesaan, pembangunan perdesaan diindonesia, peraturan pembangunan perdesaan di indonesia.

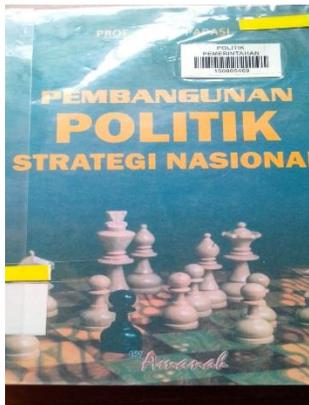
Di bab III, di bahasa tentang Tipologi dan Karekaterlistrik Desa, diantaranya yaitu : gegrafi, tepografi, dan demografi kawasan pedesaan, infrasruktur fisik, infrastruktur ekonomi, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, pembangunan pertanian, tingkat industrialisasi, perkembangan usaha non- pertanian, pendidikan dan kesehatan, tingkat rawan bencana, aspek kelembagaan dan modal sosial, aspek sosial budaya.

Bab IV, membahas tentang program-program pembangunan perdesaan, diantaranya yaitu distribusi program pembangunan perdesaan, program pembangunan perdesaan berdasarkan wilayah, program potensi per wilayah, isu-isu penting.

Bab V membahas tentang Strategi pembangunan perdesaan berbasis lokal, diantaranya membahas tentang indikator pembangunan perdesaan, strategi pembangunan perdesaan berbasis lokal, prioritas pembangunan perdesaan berdasarkan tipologi desa.

12. Tgl 09-03-2023 “ PEMBANGUNAN POLITIK STRATEGI NASIONAL”

Pengarang : Prof. DR. J.M. PAPASI.



Cet I , Tahun 2013, Penerbit : CV. Amanah Bandung.

Xii + 300 hlm, 17,5 x23,8 cm

ISBN : 978-602-9484-10-6

Pembangunan politik dalam buku ini dimaksudkan pembangunan politik dalam arti luas, tidak dalam bidang politik semata, tetapi mencakup seluruh kehidupan negara dengan pendekatan makro politik, disiplin ilmu dan teknologi, mencakup persektif dan strategi nasional pengaruh pemikiran politik dan karya nyata atas dasar pondasi kuat idiologi pancasila menegedepankan kepentingan nasional dinilai tinggi. Dari perspektif dan strategi nasioanal pembangunan kesejahteraan rakyat dan negara di era milinium negara pancasila menjadi negara industri maju, kuat dan rakyat sejahtera.

Beberapa asumsi ilmu politik digunakan sebagai pangka;l otak seperti yang diutarakan oleh Roger H. Soltau dalam buku yang berjudul, An introduction to politics (1960), disusul oleh pemahaman tentang tiga dimensi sejarah, utamanya untuk masa depan yang maju, kini kita harus berbuat ada dan bagaimana, sehingga untuk itu karya ini di ketengahkan..

pembangunan pada umumnya, khususnya untuk negara, mengindikasikan suatu proses panjang tiada henti, tetapi juga mengisahkan kejadian dari masa lampau tali temali masa kini terkait masa deapan. Di atas pemikiran itudibangun pondasi dan pemikiran tentang teori normatif dan nilai menentukan berhasil tidaknya pembangunan.

Menentukan ilmu politrik, politik adalah urusan setiap orang dari lahir hingga meninggal dunia dan manusia sifatnya individual sekaligus sosial, incalculable and anexpected. (Roger H. Soltau,hln,9). Penekanan bisa dilakukan sebagai upaya pembangunan yang lebih menghasilkan perubahan ke arah yang lebih maju. Secara singkat disini teori di kemukan oleh Carl J Bellone bahwa ‘ a norm is a behavioral efecton widely held by a group of individual or by society” they tell haw ap erson oriented – wel can sill take of organitaton approch to the fenomena we stady ‘ (organisation theory adn the new Pblic adminitration,1960, hln 4-5).

Pembangunan politik stategi nasional menghasilkan sistem-sistem modern kebanggaan nasioanal dan dinilai tinggi dan terperihara dengan baik ditengah-tengah percaturan politik dunia, perspektif dan strategi nasional tetap konsisten. Singkatnya buku ini sejatinya adalah pendidikan politik makro stategi nasional dan perspektif pembangunan kesejahteraan rakyat dan negara di kawal oleh para pemimpin yang melayani masyarakat dengan cerdas dan sukses. Hidup sukses penuh kewajaran untuk menyukseskan yang lain, bekerja sekuat tenaga untuk kepentingan umum, di nilai tinggi.

Buku ini di bab I membahas tentang Pembangunan Politik antara lain ; a) pembangunan politik strategi nasioanal pengaruh pemikiran sosial poliik dan karya nyata berdasar kan fondasi kuat idiologi pancasila mengedepankan kepentingan nasional, dinilai tinggi. b) strategi nasioanal pengaruh pemikiran sosial politik dan karya nyata berdasarkan idiologi pancasila mengedepankan kepentingan nasional. c) strategi nasioanal pembangunan politik nasional indonesia di latar belakang visi indonesia masa depan dan program pembangunan.

Bab II membahas tentang Strategi Nasioanal pengaruh pemikiran sosial politik dan keputusan politik di semua lembaga negara atas asas.

- a. Idiologi negara liberal berpengaruh terhadap negara.

- b. Ideologi liberal dan birokrasi.
- c. Pelaksanaan tugas negara sistem pemerintahan, sosial ekonomi.
- d. Teori dan metode pembagian kekuasaan negara liberal.

Bab III membahas tentang strategi nasional pengaruh pembangunan sistem politik modern. Diantaranya membahas tentang :

- a. Landasan teori sistem politik Indonesia.
- b. Metode penelitian dan analisis sistem politik.
- c. Riset dan analisis sistem politik dan politik masyarakat.
- d. Perkembangan sistem politik dan kontrol politik.

Bab IV membahas tentang Strategi nasional pengaruh sosialisasi intensif pendidikan Pancasila masa kini. Diantaranya :

- e. Pengaruh ideologi negara Pancasila dan lembaga negara dan konstitusi.
- f. Contoh pengaruh ideologi negara Pancasila terhadap negara lain di dunia
- g. Peranan lembaga pendidikan tinggi dan pembangunan “ Nation character building”

Bab V membahas tentang strategi nasional pengaruh elemen negara dan masyarakat membangun daya saing dan kerjasama regional dan internasional mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

- a. Masalah HAKI daya saing SDM regional.
- b. Proses kerjasama politik dan peranan Indonesia
- c. Pengaruh proses manajemen berkualitas standar internasional dan industri strategis

Bab VI Strategis Nasional membangun reformasi fungsional birokrasi administrasi negara Indonesia, membahas tentang

- a. Masalah intangibel birokrasi Indonesia : kepentingan umum dan kepercayaan masyarakat.
- b. Pengendalian diri atas dasar moral dan substansi ilmu administrasi negara
- c. Pengaruh sistem politik dan program pemerintah.
- d. Pelayanan administrasi lancar dan kepercayaan masyarakat kuat.

Bab VII , Strategi nasional pengaruh pelaksanaan tugas pemerintahan dengan kemampuan pelayanan koordinasi tinggi dan ketahanan mental prima.

- a. Pemerintah good governance : bauran manajemen pemerintahan dan penekanan terhadap kasus.
- b. Teori evaluasi kinerja pemerintah
- c. Teori pembagian kekuasaan pemerintahan.
- d. Kapita selkta ilmu pemerintahan.
- e. Daya saing pembangunan daerah.
- f. Pengaruh media massa dalam pembangunan politik.
- g. The communication of skill and ideas & akselerasi pembangunan politik.
- h. Organisasi jurnalistik dan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab.
- i. Perubahan orientasi.

Bab VIII , Strategi nasional pengaruh elemen sosial masyarakat sosialisasi internalisasi partisipasi kebijakan pemerintah di berbagai bidang pemangunan, membahas diantaranya :

- a. Pengetahuan umum kehidupan sosial masyarakat.
- b. Teori antar ilmu sosial.
- c. Arah pembangunan ilmu ilmu sosial politik
- d. Metode pendelkatan dan analisis ilmu sosial.

Dan bab yang terakhir Bab IX , Strategi Nasional pengaruh pemikiran politik berdasarkan falsafah negara pancasila dan karya nyata di nilai tinggi, antara lain di bahas yaitu :

- a. Sejarah perkembangan falsafah liberal dan komunis.
- b. Falsafah negara non lialisme
- c. Filsafat politik kedaulatan.
- d. Filsafat politik nasionalisme.

13. Tgl 13-03-2023 “ADMINISTRASI PEMBANGUNAN STUDI KAJIAN PKL”

PENGARANG : DR.,DRS.,GASFER LIAUW,M.SI.



Penerbit : PT. Refika Aditama, Cet . I Desember 2015

XX + 198 hlm, 18 x 25,4 cm

ISBN : 978-602-7948-84-6

Buku ini yang di sarikan dari Desertasi dengan judul *Dampak Eksistensi Informal Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah (studi kasus pedagang kaki lima di Wamena Kab. Jaya wijaya)* memberikan gambaran spesifik penuh makna tentang krotibusi hasil usaha sektor informal dalam perekonomian rumah tangga para pelakunya, dampak positif dari eksistensinya, faktor-faktor, dan strategi pendukung serta penghambat dalam pengembangan usahanya, karakteristik pelaku dan usahanya, serta peran stakeholders. Dalam buku ini, di jumpai pula sebuah teori baru, *Teori Adeptif Restribusi Pajak sebagai “ bast prectces”* yang jika di uji dari keabsahan datanya, melalui pengujian transferability (validasi eksternal) dapat di terapkan di daerah lain di Indonesia yang kondisi obyektifnya hampir sama atau tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian buku ini.

Model-model tersebut, yaitu instiuisional, residual, campuran,korporasi, dan minimal. **Pertama**, model intitusional adapun yang menyebutnya model universal, model ini dipengaruhi oleh paham liberal. Kesejahteraan dipandang sebagai hak seluruh warga sehingga pelayanan kesejahteraan dilakukan secara permanen dan tidak memandang strata sosial dan ekonomi masyarakat **Kedua**, Model Residual, model ini pelayanan

secara selektif, dipengaruhi paham konservatif dan di dorong oleh ideologi neo liberal dan pasar bebas. Pelayanan yang diberikan dengan skema waktu yang singkat yang akan di berentikan jika dirasa cukup. **Ketiga**, model campuran merupakan bentuk kompromi terhadap pertentangan yang terjadi pada saat krisis ekonomi di dunia tahun 1970-an. Model ini menempatkan negara, sektor nonformal, volunter, dan lembaga komersial dalam posisi yang sama dalam tugas pemenuhan kebutuhan warga negara. **Keempat**, model korporasi diterapkan dengan memberikan jaminan sosial kepada warganya atas skema kontribusi kerja. Kontribusi jaminan sosial berasal dari tiga pihak yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. **Kelima**, model minimal negara penganut model ini memberikan anggaran yang kecil dalam belanja sosial karena memang negara tersebut masih tergolong miskin ataupun karena tidak memiliki political will terhadap pembangunan sosial. Pelayanan di berikan secara temporal, minimal, dan sporadis.

Membaca tulisan Gasfer Liauw (GL) tentang bagaimana penanganan pedagang kaki lima khususnya di kota wamena, sungguh menarik, bahkan pada beberapa bagian cukup mengundang rasa kagum. Betapa tidak, dibebberapa kota lainnya banyak pejabat berlomba-lomba membuat kebijakan untuk menyikirkkan keberadaan pedagang sektor informal dengandalih demi keindahan kota ataupun alasan kebersihan. GL melihat dari perspektif yang lain, yakni memberikan ruang untuk terbinanya kelompok masyarakat dalam sistem kesejahteraan publik.

Kalau mau jujur, ekonomi bangsa kita itu sangat kuat di topang oleh keberadaan UMKM yang sebagian besar diantaranya sektor informal. Betapa tidak, kontribusi kelompok ini terhadap pembentukan PDB sekitar 60%, demikian pula kemampuan menyerap kesempatan kerjanya pun sangat besar. Tidak kurang dari 95% tenaga kerja kita terserap di kelompok UMKM ini. Sementara disisi lain, belum terasa adanya kebijakan pemerintah ataupun perbankan, baik di bidang pembiayaan maupun kelembagaan yang mendorong tumbuhnya sektor ini secara baik bisa dibandingkan dengan negara jiran, kita di lingkungan ASEAN yang lebih jelas dalam pembangunan UMKM- nya.

GL mencoba mengisi kekosongan ketiadaan kebijakan yang berpihak kepada kelompok ini, khususnya para pedagang kaki lima di provinsi yang termasuk terkaya di indonesia. Sejujurnya saya harus katakan bila seorang akademisi biasanya yang melontarkan

gagasan ini adalah lumrah dan wajar-wajar saja. Namun, GL adalah seorang pejabat daerah yang lajimmya cenderung memilih keindahan kota lebih penting dari kehidupan rakyat. Dia berfikiran lain, dia beranggapan, bahwa didaerah arus ekonomi kapitalias sangat deras datangnya ke daerah, seyogyanya daerah memiliki konsep perlindungan bagi pengusaha kecil di daerahnya, dengan demikian, pembangunan tidak membuat penduduk aslidaerah tersingkir karena ketunaan kapital yang dimiliki.

Dalam bab I Menjelaskan tentang pembahasan Pedang Kaki Lima di Wamena yaitu tentang kasus PKL diwamena dan diawali dari Desertasi.

Bab II Telaah Pustaka Tentang PKL yang membahas tentang teori interaksi sosial, teori sosiologi ekonomi, konsep sektor informal, sistim sosial ekonomi, teori pemberdayaan , sektor informal vs sektor formal, sektor informal; PKL ekonomi sikecil, PKL perspektif sistem ekonomi , PKL perspektif kebijakan publik, kajian searah.

Bab III Memahami PKL sikecil yang berjasa. Membahasa tentang opperasionalisasi.

Bab IV Metodologi Kajian terhadap PKL yang membahas tentang data, uji keabsahan data, analisis data.

Bab V Sikecil dari Wamena yang menjelaskan tentang sejarah pedagang kaki lima, gambaran terkini pedagang kaki lima, kebijakan pemerintah.

Bab VI Jasa sikecil dari Wamena yang membahas tentang kontribusi dari rumah tangga, dampak fositif bagi perekonomian masyarakat, dampak positif bagi kebijakan pemerintah, dampak negatif bagi perekonomian masyarakat, dampak negatif bagi kebijakan pemerintah.

Bab VII, Pendukung dan Penghambat Usaha si Kecil, membahas tentang Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.

Bab VIII Karakteristik Pelaku Usaha yang membahas tentang karakteristik usaha pedagang kaki lima, analisis peran stakeholders dalam pembangunan usaha pedagang kaki lima.

Bab IX, Stategi Bersaing yang membahas tentang analisis SWOT, Faktor external, faktor internal, strategi pemnbangunan usaha.

Bab X, Diskusi Bukti Nyata, yang membahas tentang temuan penelitian, implikasi best practices, rangkuman temuan penelitian, temuan baru, teori baru, keterbatasan penelitian. dan bab xi yang terakhir EPILOG, renuangan untuk sikecil.

14. Tgl 13-03-2023 “ PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI “

Pengarang : Sjafrizal



Ed I, Cet. 4 Depok Rajawali press, 2017

Xviii + 406 hlm , 24 cm

Bibliografi ; hlm 399

ISBN : 978-979-769-703-7.

Memperhatikan perkembangan ini, penulis merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi dengan menyiapkan sebuah buku tentang perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi. Buku ini mempunyai karakteristik kasus dalam dua hal yaitu : pertama, buku ini menekankan pembahasan terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang dewasa ini berlaku di seluruh Indonesia. Kedua, buku ini juga menekankan analisisnya pada aspek-aspek yang bersifat praktis dan operasional sesuai dengan kondisi umum yang terdapat di kebanyakan daerah di Indonesia. Dengan demikian , buku ini akan dapat di gunakan baik sebagai buku ajar di perguruan tinggi maupun sebagai acuan bagi para perencana yang bekerja pada badan perencanaan

pembangunan daerah (bapeda) dan intansi pemerintahan daerah di seluruh indonesia yang mempunyai bagian perencanaan dan penyusunan program.

Buku ini terdiri dari 19 bab yang kesemuanya di kelompokkan atas 3 bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. **Bagian pertama**, menyangkut dengan proses perencanaan pembangunan daerah yang merupakan landasan ilmiah dan landasan hukum dari buku ini. **Bagian kedua**, berisikan beberapa teknik perencanaan yang bersifat raktis dan oprasional yang dapat digunakan untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. **Bagian ketiga**, membahas teknik penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan keluaran (output) utama dari kegiatan perencanaan pembangunan daerah ini.

Di bagian pertama: Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah. Bab I Yang membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, perlunya perencanaan pembangunan daerah, dari perencanaan ekonomi ke perencanaan pembangunan, sejarah perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan nasional vs daerah, perencanaan pembangunan daerahan dalam era globalisasi, dokumen perencanaan pembangunan daerah, ruang lingkup dan sistimatika penulisan buku ini.

Bab II Konsep dasar pembangunan Daerah, dalam bab ini yang di bahas adalah munculnya ilmu perencanaan daerah, mengapa perlu berencana?, pengertian perencanaan daerah, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah, jenis perencanaan pembangunan daerah, tahap perencanaan pembangunan daerah, siklus perencanaan pembangunan daerah, ciri-ciri perencanaan pembangunan daerah.

Bab III Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dibahas dalam bab ini adalah. Kondisi umum daerah, visi dan misi pembanguana daerah, sasaran dan target pembanguan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan pembanguan daerah, indikator kinerja.

Bab IV Ruang lingkup dan Perencanaan Pembangunan Daerah yang di jelaskan dalam bab ini adalah perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan wilayah (regionanl) perencanaan proyek (kegiatan).

Bab V Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yaitu membahas tentang . permasalahan perencanaan pembangunan di Indonesia, sasaran pokok SPPN, Dokumen perencanaan pembangunan, keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan, mekanisme penyusunan rencana pembangunan, perencanaan dan penganggaran, pengendalian (Monitoring) dan evaluasi, perencanaan pembangunan nasional versus daerah.

Bab VI Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Yang dibahas dalam bab ini yaitu konsep otonomi daerah, reorientasi perencanaan pembangunan daerah, SPPN 2004, komplikasi otonomi daerah terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Bab VII Perencanaan dan Pelaksanaan. Dalam bab ini membahas yaitu persyaratan untuk terjaminnya pelaksanaan rencana, kegagalan teknik perencanaan, kegagalan pelaksanaan rencana.

Bagian kedua, Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah. ada tujuh bab diantaranya yaitu :

Bab VIII Teknik Indikator Pembangunan Daerah, ada dua bahasan diantaranya indikator ekonomi daerah, dan indikator kesejahteraan sosial.

Bab IX Teknik Perencanaan Regional dalam bab ini menjelaskan produk domestik regional bruto, koefisien lokasi, analisis shift-share, indeks ketimpangan ekonomi regional, tipologi kawasan, model difusi.

Bab X Teknik Analisis Input- Output yang membahas tentang landasan teoritis, teknik analisis input-output nasional, teknik input-output regional, manfaat bagi perencanaan pembangunan daerah.

Bab XI Teknik Prediksi yang membahas dalam bab ini adalah

- a. Teknik prediksi trend
- b. Teknik prediksi sebab dan akibat
- c. Teknik prediksi rata-rata bergerak.
- d. Teknik prediksi dekomposisi

- e. Teknik prediksi ARMA.
- f. Teknik Pertumbuhan Ekonomi Harrod Domar

Bab XII Teknik Analisis SWOT. Yang dibahas dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian analisis SWOT, manfaat analisis SWOT untuk perencanaan, analisis faktor strategis, perumusan strategi dengan teknik SWOT, kelemahan analisis SWOT.

Bab XIII Teknik Indikator Kinerja. Dalam bab ini membahas yaitu pengertian indikator kinerja, fungsi dan manfaat indikator kinerja, jenis indikator kinerja, pengukuran indikator kinerja, persyaratan indikator kinerja, target kinerja, langkah operasional penyusunan indikator kinerja, contoh penyusunan kinerja program.

Bab XIV Teknik Evaluasi Pelaksanaan Kinerja, dalam bab ini membahas tentang tujuan, sasaran dan manfaat evaluasi, teknik evaluasi kinerja makro, teknik evaluasi makro spesifik, teknik evaluasi kinerja program.

Bagian Ketiga : Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. dalam bagian ketiga ini ada 6 bab yang akan di bahas diantaranya :

Bab XV Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. dalam bab ini membahas tentang periode waktu RPJPD, pola penulisan RPJPD, kondisi umum daerah, analisis isu strategis daerah, prediksi sasaran umum pembangunan daerah, penetapan visi dan misi pembangunan daerah, perumusan arah pembangunan daerah, pentahapan pembangunan daerah.

Bab XVI Penyusunan rencana pembangunan daerah jangka menengah. Dalam bab ini membahas tentang periode waktu RPJMD, pola penulisan RPJMD, kondisi umum daerah, kerangka ekonomi makro dan sumber pembiayaan, visi dan misi kepala daerah, strategis pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum daerah, pembangunan berdimensi wilayah, program dan kegiatan pembangunan daerah, indikator kinerja, matrik program dan kegiatan.

Bab XVII Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. dalam bab ini menjelaskan tentang yaitu pengertian rencana strategis, kaitan antara Renstra SKPD dan RPJMD, Proses penyusunan Renstra SKPD, Kondisi umum SKPD, isu strategis daerah,

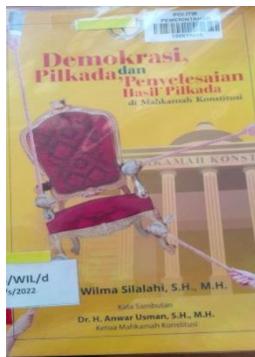
prediksi dan sasaran jangka menengah, perumusan Strategi dan kebijakan pembangunan, indikator kinerja program dan kegiatan.

Bab XVIII Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. dalam bab ini membahas tentang pengertian rencana kerja pemerintahan daerah, peran rencana tahunan, unsur pokok rencana tahunan, keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan, keterkaitan RKPD dan APBD, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, penilaian ketersediaan dana pembangunan daerah, perumusan kebijakan tahunan, penetapan program dan kegiatan RKPD, indikator dan target kerja.

Bab XIX Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. bab ini membahas tentang pengertian renja SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen lainnya, kerangka penulisan renstra SKPD, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu, perumusan kebijakan pembangunan tahunan, analisis pembangunan sumber pembiayaan, perepan program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kerja, pagu dana indikataif.

15. Tanggal 14-03-2023 “ DEMOKRASI, PILKADA DAN PENYELESAIAN HASIL PILKADA di Mahkamah Konsitusi”

Pengarang : DR. WILMA SILALAH,SH, MH.



Ed,1, Cet . 1, - Depok: Rajawali Press , 2020

Xxxvi, 188 hlm, 23 cm

Bilbiografi : hlm 171

ISBN : 978-623-231-499-3

Menurut **Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M. Hum.** Rektor Universitas Sumatera Utara Bahwa buku ini tidak ketinggalan menyajikan bagaimana Mahkamah Konsitusi senantiasa memperbaharui tata beracara di Mahkamah Konsitusi melalui peraturan Mahkamah Konsitus, sehingga memudahkan para pihak beracara di Mahkamah Konsitusi. Penulis merangkai tulisannya dalam kata dan kalimat yang tidak membosankan dari awal hingga akhir kalimat sehingga pembaca tidak bosan membacanya. Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hasil pilkada sampai di bentuknya badan peradilan khusus, hadir da;lam memeriksa, mengadili, danmemutus sesuai dengan amanat konsitusi. Oleh karena itu, mahkamah konsitusi di haapkan kewibawaan nya untuk menjadi benteng terakhir bagi penyelesaian sengketa pilkada yang mencerminkan rasa keadilan dan dapat di terima oleh masyarakat, mahkamah konsitusi diharapkan dapat menjalankan visi dan misinya walaupun di tengah situasi pandemi covid 19 yang terjadi saat ini.

Menurut **Prof., Dr. Jamal Wiwoho,SH., M.Hum.** Rektor Universitas Sebelas Maret isi buku ini mengupas seluk beluk pemilihan kepala daerah secara komperhensif, mulai dari sejarah demokrasi dan sistem pemilihannnya, pemilihan kepala daerah dalam sistem pridensial, juga menguarai pemilihan kepala daerah serentak, termasuk evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan model pemilihan kepala daerahnya, serta memberikan gambaran pula tentang penyelesaian masalah pemilihan hasil pemilihan kepala daerah.

Tuntunan agar pilkada serentak dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan keadilan, serta dilandasi prinsip tranfaransy,accountable, have integrity, serta to be responsible merupakan harga mati yang harus di perjuangkan keberhasilan oleh semua pihak. Memastikan output penyelenggaraan pilkada menghasilkan kepala daerah yang bersih, baik dengan cara memenangkan pilkada maupun program kerja yang ditujukan untuk kepentingan publik daerah adalah tugas berat yang harus pula di wujudkan oleh [penyelenggara pemilu. Pilkada serentak tentu akan menjadi tantangan apakah kualitas demokrasi indonesia mengalami peningkatan ataupun sebaliknya.

Kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilihan pilkada pada tahun 2020 ini berada ditengah masa pandemi covid 19 ini memiliki tantangan baik dari sisi teknis

maupun kualitas penyelenggaraan. Sebanyak 106 juta pemilih dalam penyelenggaraan pilkada di 270 daerah harus dipastikan partisipasinya dalam pilkada. Meningkatkan partisipasi pemilih di situasi pandemi saat ini tentu bukan perkara mudah, apalagi hingga mampu menyamai persentase partisipasi pemilih seperti pilkada serentak 2018 lalu yang cukup tinggi yakni sebanyak 73,24% sekali lagi, persoalan partisipasi pemilih, keselamatan pemilih dan penyelenggara, sosialisasi penyelenggara, pilkada visi dan misi kandidat harus di pastikan tidak ada persoalan pada saat penyelenggara pilkada.

Kalau menurut **Prof. Dr. A. Melanik Rompegading. SH., MH.** Rektor Universitas Sarwerigading Makasar. Buku ini hadir tepat waktu, disaat bangsa Indonesia baru pertama kali mengalami kejadian non-alam pandemi covid-19, yang hingga terbitnya buku ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah pandemi covid-19 Mahkamah Konsitusi hadir sebagai salah satu lembaga pengawal demokrasi, sudah menyiapkan aturan yang jelas dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang pelaksanaannya sempat tertunda akibat pandemi covid -19. Para peserta pilkada yang tidak puas hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU, sudah ada aturan yang jelas yang akan mengkomodir permasalahan tersebut, Mahkamah Konsitusi sudah menyiapkan pedoman tata cara penyelesaian perselisihan hasil pilkada untuk memudahkan para pihak dalam beracara di Mahkamah Kaonsitusi.

Menurut **Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. berbicara mengenai demokrasi memang tiada habisnya. Demokrasi yang dilaksanakan melalui indirect democracy sangat dibutuhkan tingkat dukungan yang tinggi dari rakyat. Buku karya Dr. Wilma Silalahi ini menguraikan bagaimana agar memperoleh suatu pemilihan kepala daerah yang berkualitas, harus dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan aturan / regulasi yang kuat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. selain itu, dengan banyaknya sengketa perselisihan hasil pilkada yang diajukan ke Mahkamah, rakyat berharap banyak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu Mahkamah konsitusi hadir untuk itu, dengan catatan yang akan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan penuh integritas sehingga keadilan dan kepastian hukum

tercapai serta kepercayaan terhadap penegak hukum penyelesaian perselisihan hasil pilkada warga masyarakat tercapai.

Menurut Prof. Dr. Farida Patittingi, SH, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Pilkada adalah demokrasi lokal yang paling intim dengan masyarakat, karena mereka akan memilih secara langsung para pemimpin di daerahnya. Para gladiator yang berkompetisi di daerahnya tentunya harus bertarung dengan berbagai strategi dan upaya agar dapat keluar jadi pemenangnya. Dalam sengitnya pertarungan itu seringkali menimbulkan benturan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, yang tentunya akan melahirkan silang sengketa yang berujung pada perselisihan hasil pemilihan, sebagai akhir dari semua proses hukum dalam pilkada, di ujung, Mahkamah Konstitusi menjadi the guardian, yang akan menjaga "kemurnian" hasil itu dengan memutuskan perselisihan hasil secara adil berdasarkan hukum konstitusi. Buku ini menyuguhkan argumen yang sistematis, terukur, ilmiah dan menarik untuk dibaca bak melodi yang terangkai dalam irama yang menyenangkan jiwa. Ia mampu meliah secara jernih pemurnian demokrasi itu ketika hukum harus ditegakkan melalui serangkaian mekanisme dan tahapan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Mahkamah konstitusi.

16. Tgl. 20-03-2023 “ PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, Teori dan Aplikasi “

Pengarang : Prof. Dr. Ir. ALI KABUL MAHI,M.S.

Dr. SRI INDRA TRIGUNARSO,S.K.M., M.Kes.



Cet I, KENCANA, 2017

15 X 23 cm, xiv, 300 hlm

ISBN. 978-602-422-182-9

Dengan buku ini diharapkan pembaca akan mengetahui secara mendasar yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan perencanaan daerah. tulisan ini di maksudkan untuk mendalami ilmu perencanaan pembangunan daerah, dengan berbagai aspek pendukungnya seperti konsep perencanaan, konsep dan tolak ukur pembangunan, proses penyusunan dokumen proses perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan berkelanjutan, perencanaan percepatan pembangunan perdesaan, penataan ruang wilayah darat dan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perencanaan kota pantai (water front city) dan perencanaan mitigasi bencana.

Utuk memudahkan pengkajian materi buku ini, maka dalam penulisannya di mulai dari Bab I Konsep Perencanaan Pembangunan pada bab ini membahas berbagai konsep perencanaan – perencanaan partisipatif, konsep pembangunan, tolak ukur pembangunan dan pembangunan berkelanjutan. Pada Bab 2 Proses Perencanaan Pembangunan Daerah, yang membahas konsep perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD. Pada bab ini juga di bahas tentang analisis SWOT sebagai dasar penyusunan RENTRA satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bab 3 Perencanaan Perencanaan Pembangunan Perdesaan dengan konsep Agropolitan, yang membahas konsep pembangunan perdesaan berdasarkan konsep AGROPOLITAN, dan konsep pertumbuhan ekonomi masyarakat berdasarkan Agrobisnis. Pada bab ini juga di kemukakan studi kasus penelitian pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis Agrobisnis (Lampung Selatan dan Lampung Tengah). Bab 4 Penataan Ruang Wilayah Darat dan Pesisir, yang membahas tentang konsep penataan ruang, penataan ruang wilayah darat yang dihubungkan dengan undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang penataan Ruang, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang didasarkan dengan undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K). Bab 5 Perencanaan Kota Pantai (Water Fron City) membahas konsep dan tipologi water fron city dan studi kasus perencanaan water fron city Bandar Lampung. Bab 6 Mitigasi Bencana, membahas konsep mitigasi, potensi Bencana, tahapan mitigasi bencana, dan stadi kasus program mitigasi bencana Kabupaten Lampung Selatan.

17. tgl 20-03-2023 “ Pembangunan Masyarakat Desa”

Pengarang : Dr. Endriatmo Soetarto

Martua Sihaloho



Cet 7, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2018

X + 202 hlm.

ISBN : 978-979-011-464-7

Hakekat pembangunan adalah terjadinya proses perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Jadi, pembangunan masyarakat desa berarti adanya proses perbaikan keadaan masyarakat desa menuju pada peningkatan kesejahteraan yang dilakukan secara terus menerus sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa dengan melibatkan semua pihak pemangku kepentingan, yaitu masyarakat, agen perubahan, dan pemerintahan.

Tingkat partisipasi masyarakat desa menjadi proses yang akan menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini dibahas tentang bagaimana melakukan perencanaan dan proses yang harus dilakukan agar masyarakat desa mampu berperan dalam setiap tahapan pembangunan. Selain pemahaman terhadap masyarakat desa, pemahaman anda juga diperlukan terhadap peran penyuluhan atau agen perubahan atau pihak pendamping yang akan mendorong partisipasi aktif masyarakat desa mulai dari proses perencanaan , pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan serta keberlanjutan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mata kuliah ini di tulis dalam 6 modul, yaitu :

Modul pertama mempelajari, Desa dan Kebudayaan Petani. Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu : kegiatan belajar 1 tentang “ terbentuknya desa dan kebudayaan petani” serta kegiatan belajar 2 tentang perkembangan desa.

Modul kedua yang mempelajari, pembangunan dalam berbagai persektif, modul 2 terdiri atas 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 tentang persektif modernisasi: pendekatan kultural dan pendekatan struktural, sedangkan kegiatan belajar ke 2 tentang : persektif multikulturalisme dan otonomi daerah.

Modul ketiga yang mempelajari, Mode produksi kapitalistik dan problem –problem sosial. Modul ke 3 terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 1 tentang persektif materialisme: mode produksi dan implikasinya. Serta kegiatan belajar 2 tentang pengangguran dan dimensi kependudukan.

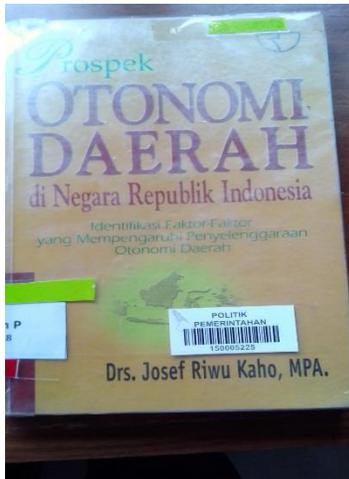
Modul ke empat yang mempelajari bentuk-bentuk pengendalian masyarakat dan pengawasan sosial. Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 1 tentang pengendalian masyarakat dan pengawasan sosial dan kegiatan belajar ke 2 tentang kemiskinan struktural dan proses pembangunan.

Modul ke lima yang mempelajari, konsep pemberdayaan dalam dinamika pembangunan desa dan hubungannya dengan keberlanjutan pembangunan berbasis masyarakat . modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar: yaitu kegiatan belajar ke 1 tentang pemberdayaan dan dinamika pembangunan desa, kegiatan belajar ke 2 tentang pembangunan berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Modul ke enam yang mempelajari dasar-dasar, peran dan partisipasi penyuluhan dalam pembangunan masyarakat desa. Modul ini terdiri 2 kegiatan belajar yaitu kegiatan belajar 1 tentang pengertian penyuluhan dan penyuluhan dan kegiatan belajar ke 2 tentang masyarakat desa berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

18. TGL 18 -03- 2023

“PROSPEK OTONOMI DAERAH DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA” Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah.



Pengarang : DRS. JOSEF RIWU KAHU, MPA

Cet ke 10, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2010

Xiv, 306 hlm,21 cm

Bibliografi : hlm 297

ISBN : 979-421-184-2

Buku ini merupakan upaya penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran ke arah perwujudan otonomi daerah seperti di maksudkan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok pemerintahan daerah.

Pada bagian awal-awal buku ini penulis memuali dengan serangkaian pengertian pokok tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip desentralisasi ini. Juga digambarkan secara ringkas mengenai sejarah perkembangan otonomi daerah di indonesia sejak periode kolonial Belanda, zaman pemerintahan militer Jepang, sampai masuk ke masa indonesia merdeka.

Pada bagian selanjutnya, yang merupakan intisari buku ini, penulis berusaha mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah.

faktor –faktor tersebut sekaligus sebagai faktor yang sangat menentukan prospek otonomi daerah untuk masa yang akan datang.

Faktor pertama yang menentukan prospek otonomi daerah adalah faktor manusia sebagai faktor penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. faktor manusia haruslah lebih baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. faktor ini mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, aparaturnya maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan.

Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas Pemerintahan Daerah. Salah satu ciri dari daerah otonomi adalah terletak pada kemampuan *self supportingnya* dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sumber keuangan yang asli, misalnya pajak dan retribusi Daerah, hasil perusahaan daerah dan dinas daerah, serta hasil daerah lainnya yang sah, haruslah mampu memberikan kontribusinya bagi keuangan daerah.

Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya. Syarat-syarat peralatan semacam inilah yang sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya pemerintahan daerah.

Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, efektif. Oleh sebab itu perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut dari para penyelenggara pemerintahan daerah. sejarah perkembangan otonomi daerah membuktikan keempat faktor tersebut di atas masih jauh dari yang diharapkan. Karena otonomi daerah masih menunjukkan sosoknya yang kurang mengembirakan. Oleh sebab itu apabila kita berkeinginan untuk merealisasikan cita-cita

otonomi daerah maka pembenahan dan perhajian yang sungguh-sungguh perlu di berikan kepada empat faktor di atas.

19. Tgl. 10-03-2023



JUDUL “ REVOLUSI DARI DESA” Saatnya dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat.

Pengarang : DR. YANSEN TP.,M.S.i

Penerbit : PT. Gramedia, Jakarta ,2014

xxviii + 192 hln, ILUS

ISBN : 978-602-02-5099-1

Topik yang diambil oleh penulis mengenai pembangunan berbasis pedesaan sangat penting dan aktual. Dikatakan demikian karena proses penyusunan bukunya bersamaan dengan ramainya pembahasan rancangan undang-undang tentang desa kontroversial. Disebut kontroversial karena adanya pertarungan gagasan yang sangat keras antara pihak pemerintah dengan pihak DPR RI, maupun kalangan internal DPR RI sendiri. Pertarungan antara keinginan memperkuat aspek pemerintahan desa, ataukah memperkuat desa sebagai sebuah komunitas. Wujud akhirnya berupa kompromi politik dalam bentuk UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menggunakan konstruksi dan gabungan antara desa yang berkedudukan yang berfungsi sebagai **Self-governing community** dengan desa yang berkedudukan dan berfungsi sebagai **lokal self government**.

Penulis buku ini yang menawarkan gagasan agar pembangunan sebaiknya di mulai dari bawah, sejalan gagasan yang termuat dalam UU nomor 6 tahun 2014. Melalui UU ini, ada keinginan politik agar desa dapat kembali menjadi komunitas yang mampu membangun wilayah dan penduduknya, seperti pada masa lalu (Soetardjo) mengatakan bahwa desa merupakan “republik kecil” yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kedudukan dan peran ini diancurkan pada masa UU no 5 tahun 1974 tentang pokok –pokok pemerintahan di daerah junto UU nomor 5 tahun 1997 tentang pemerintahan desa.

Diindonesia sendiri dikenal konsep pembangunan desa. (rural development) yang kemudian di ubah namanya menjadi pembangunan masyarakat desa (rural community development) program yang dibuat lebih banyak dalam bentuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu membantu melaksanakan program-program yang berasal dari supra desa. Program lainnya umumnya berbentuk pemberian sedekah (charity), yang membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa. Pada sisi lain, di tanzania, pada era Presiden Julius nyerere Tahun 1970-an dikembangkan program Ujamaa Villages, yang senada dengan pembangunan masyarakat desa.

Dalam khasanah akademik , terdapat banyak istilah yang sinonim dengan konsep pembangunan masyarakat desa istilah-istilah tersebut diantaranya **community capacity building, sosial capital formaion, non-violent direct action, econoic development, commonity economic development (CED), sustainble development, commonity driven depelopment (CDD), Aseet based community depelopment (ABCD), faith based community development , community based participatory reasarch (CBPR).** Dan lain sebagainya. Apapun namanya tujuannya tetaplah sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperdeasaan, yang secara ekonomi politik dan sosial budaya tertinggal dibandingkan masyarakat yang tinggal didaerah perkotaan. Sebagaian orang miskin dari suatu negara berada di daerah perdesaan yang kemudian bermigrasi kekota yang secara statistik kemudian tercatat sebagai orang miskin perkotaan. Sebagai perubahan status kependudukan yang tidak mengubah keadaan.

Revolusi yang dimaksudkan penulis bukanlah revolusi secara fisik, melainkan revolusi paradigma sebagaimana dikemukakan oleh Thomas S. Kuhn; melalui program paradigma. Orang diajak untuk memikirkan kembali konsep pembangunan masyarakat desa yang selama ini lebih banyak kegagalannya dibanding keberhasilannya. Melalui Program Gerakan Desa Membangun (GERDEMA), penulis buku membuat program yang bergerak dari desa, artinya desa sebuah entitas dan komunitas bertindak sebagai subyek utama. Konsep ini berbeda dengan pembangunan masyarakat desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yang menempatkan desa lebih sebagai obyek dari program-program yang disiapkan dari pemerintahan supradesa.

Proram GERDEMA secara prinsip sejalan dengan semangat yang terkandung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan pada perubahan pembangunan negara melalui dua jalur, yakni jalur dari negara dan jalur dari negara bersama-sama dari desa, yang dapat di sederhankan .

Dalam buku ini dibahas tentang Bab I, Menerangkan menggugat konsep pembangunan yang di bahas dalam bab pertama konsep yang kurang tepat, ubah konsep pembangunan, pengalaman nyata bukan sekedar teori, percaya penuh pada ,masyarakat desa.

Bab II menjelaskan tentang teknik merancang pembangunan dalam bab ini menerangkan yaitu visi kabupaten malinau, sepuluh misi daerah, empat pilar pembangunan kabupaten malinau, tiga komitmen pembangunan kabupaten malinau.

Bab III Menjelaskan tentang GERDEMA: sebuah revolusi dari desa dinatarnya menjelaskan tentang konsep pembangunan malinau melalui GERDEMA., Kinerja dan strategi Malinau, fenomena kemiskinan dan pengangguran di Malinau, Peran utama yang mempresentasikan GERDEMA.

Bab IV menjelaskan tentang kepemimpinan dalam GERDEMA yaitu menerangkan Nilai utama dalam kepemimpinan GERDEMA.

Bab V Menjelaskan tentang profil desa dan hubungan antar lembaga, serta yang terakhir di Bab VI menjelaskan tentang mekanisme keberhasilan GERDEMA DAN YANG TERAKHIR membahas TENTANG REKAM JEJAK SEBELUM DAN SESUDAH GERDEMA..



20. Tgl. 08-05-2023 “ PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA”
Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Suatu Normatif dan
Komprehensif.

Pengarang : Bambang Trisantono Soemantri

Penerbit : Fokusmedia

Vi + 305 hlm, 15,8 x 24 cm, Cet 1 Tahun 2011

ISBN : 978-602-8733-33-5

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih dihadapkan pada sejumlah masalah dan kendala yang memerlukan upaya pemecahan melalui kebijakan dan langkah-langkah yang harus diterapkan dengan strategi yang tepat, sejalan dengan “political will” dari pemerintahan bahwa usaha memperkuat dan memajukan pemerintahan desa perlu lebih di kembangkan sehingga semakin mantap dalam melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa guna meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan , program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat.

Melalui pendekatan normatif, kami mencoba memberikan pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal lebih memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di desa, pengelola keuangan Desa, Mengelola Administrasi Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pelayanan Kependudukan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta Strategi dan Kebijakan Pengembangan Desa.

- Dalam bab I membahas tentang Pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMD), dan Kerjasama desa.
- Dalam bab II Membahas tentang Pengaturan Desa diantaranya dijelaskan diantaranya pengertian, Materi Muatan Peraturan Desa, Jenis peraturan desa, Mekanisme persiapan, pembahasan, pengesahan, dan penetapan peraturan desa, Sidang Rapat pembahasan dan penetapan peraturan desa dan teknik penyusunan.
- Bab III membahas tentang Perencanaan Pembangunan Desa. yang menjelaskan diantaranya ; Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD), Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (RKP- Desa), pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Kegiatan dan Format penyusunan RPJMD dan RKPD.
- Bab IV Membahas tentang Keuangan Desa, diantaranya menjelaskan; Pendahuluan, Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, Anggaran pendapatan dan Belanja desa, Pengelolaan alokasi dana desa.
- Bab V Membahas tentang Administrasi Desa; menjelaskan tentang Tata usaha Kantor Desa dan Kelurahan, Buku Administrasi Desa.
- Bab VI Membahas tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menjelaskan diantaranya Tahapan Pencalonan, Tahapan Pemilihan.
- Bab VII Membahas tentang Pelayanan Kependudukan, yang menjelaskan tentang Pelayanan Pemberian Kartu Keluarga (KK), Pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pendaftaran Pelaporan Kelahiran, Pendaftaran Pelaporan

Kematian, Pendaftaran Pelaporan Perpindahan Penduduk, pendaftaran pelaporan Kedatangan Penduduk.

- Bab IX Membahas tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang menjelaskan tentang ; Jenis laporan, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaporan administrasi keuangan badan Permusyawaratan desa, pembinaan dan pengawasan.
- Bab terakhir yaitu bab X membahas Strategi dan kebijakan pembangunan desa.



21. 08-09-2023. " INDIKATOR KEMISKINAN" Misklasifikasi Orang Miskin.

Pengarang : Ali Khomsan, Dkk.

Penerbit : Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
2015, Xii + 132 hlm 14,5 x 21 cm

Cet Pertama.

ISBN : 978-979-461-970-4

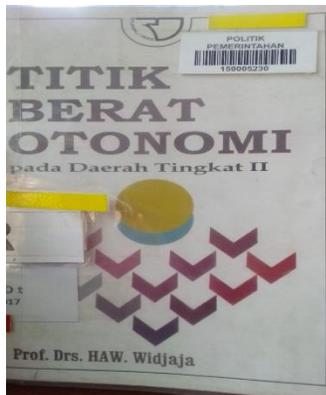
Buku ini didasarkan pada hasil penelitian tim penulis pada tahun 2011 tentang Indikator dan gold standard garis kemiskinan. Di harapkan buku ini dapat dijadikan informasi bagi pemerintah dalam program-program pengentasan kemiskinan yang akan datang.

Dalam bab pertam menjelaskan tentang pendahuluan, dilanjutkan di bab II menjelaskan tentang Konsep dan indikator kemiskinan, dan bab III menjelaskan tentang Garis Kemiskinan dan Misklasifikasi Rumah Tngga, di bab IV menjelaskan tentang Indikator Kemiskinan, bab V menjelaskan tentang Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan tidak miskin, dilanjutkan dengan bab VI menjelaskan tentang Kondidi Kesejahteraan Subyektif.dan bab terakhir menjelaskan tentang Implikasi Kebijakan.

Dilanjutkan menjelaskan tentang daftar tabel antara lain :

- Tabel 1, Ekuivalen Komsumsi Beras
- Tabel 2,Biaya Hidup Minuman Rumah Tangga.
- Tabel 3, Biaya Hidup minimum dewasa perempuan sudah menikah (18-25 tahun).
- Tabel 4, Rincian biaya hidup minimum (Rp/ Kapita/bulan)
- Tabel 5,Statistik biaya hidup minimum dan goid standard garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan).
- Tabel 6, Perbandingan beberapa garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan).
- Tabel 7, Sebaran rumah tangga menurut beberapa garis kemiskinan.
- Tabel 8, Statistik rumah tangga berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Tabel 9, Sebaran rumah tangga berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- Tabel 10, Statistik rumah tangga berdasarkan kemampuan dalam memnuhi kebutuhan sandang.
- Tabel 11, Sebaran rumah tangga berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang.
- Tabel 12, Statistik Rumah tangga berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan papan.
- Tabel 13, Sebaran rumah tangga berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan papan.

- Tabel 14, Statistik rumah tangga berdasarkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, sosial, dan informasi.
- Tabel 15, Fungsi deskriminan untuk miskin dan tidak miskin.
- Tabel 16, Misklasifikasi rumah tangga miskin menurut fungsi deskriminan.
- Tabel 17, Karakteristik soaial demokrafi rumah tangga contoh.
- Tabel 18, Sebaran suami dan istri menurut pekerjaan
- Tabel 19, Karakteristik ekonomi rumah tangga
- Tabel 20, Propesi rasio jenis pengeluaran pangan rumah tangga (Rp/Kapita/Bulan).
- Tabel 21, Propesi rasio pengeluaran non pangan rumah tangga (Rp/Kapita/Bulan).
- Tabel 22, Sebaran rumah tangga menurut karakteristik tempat tinggal.
- Tabel 23, Rata-rata standar deviasi luas kepemilikan lahan pertanian
- Tabel 24, Rata-rata standar deviasi luas kepemilikan lahan ternak.
- Tabel 25, Rata-rata standar deviasi luas kepemilikan kepemilikan kendaraan.
- Tabel 26, Rata-rata standar deviasi luas kepemilikan kepemilikan harta berharga.
- Tabel 27, Rata-rata standar deviasi luas kepemilikan kepemilikan elektronik
- Tabel 28, Rata-rata standar deviasi luas kepemilikan kepemilikan barang / alat non elektronik.
- Tabel 29, propesi terhadap pemenuhan kebutuhan fisik.
- Tabel 30, propesi terhadap pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan tentaram.
- Tabel 31, propesi terhadap pemenuhan kebutuhan untuk dicintai dan disayang.
- Tabel 32, propesi terhadap pemenuhan kebutuhan untuk di hargai.
- Tabel. 33, propesi terhadap pemenuhan kebutuhan untuk aktualisasi diri.



22. Tanggal 10-05-2023 “TINGKAT BERAT OTONOMI” Pada Daerah TK II

Pengarang : Prof.Drs. Haw Widjaja.

Penerbit : Rajagrafindo Persada,2001.

xx, 228 hlm,21 cm,

bibliografi : hlm 127

ED 1 Cet, 4 , ISBN : 979-421-323-3

Dalam hubungan ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1991 Nomor : 118/1000/SJ, maka daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada Medio September 1991 yang lalu, telah melaksanakan penelitian kemampuan pada seluruh Daerah Tingkat II se Sumatera Selatan, dalam rangka persiapan pelaksanaan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II.

Adapun tujuan dari penelitian tersebut utuk memperoleh gambaran yang obyektif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk menyusun pola pembinaan bingbingan, yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Namun demikian kami menyadari bahwa hal tersebut belum merupakan usaha yang optimal, terutama dalam rangka mewujudkan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentnag pokok-pokok pemerintahan di daerah.

Naskah mula disusun dalam rangka panel diskusi Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dalam rangka memperingati Dies Natalis XXXI,1991,31

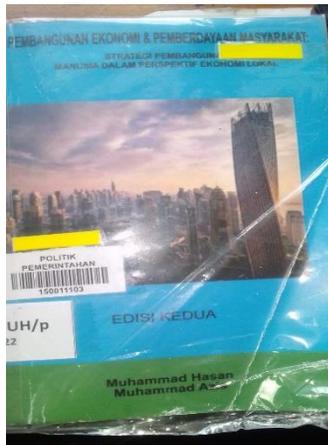
Oktober 1991. Selanjutnya atas permintaan Daerah Tingkat II Musi Rawas, dengan surat Nomor 180/16/Hk, tanggal 10 Januari 1992, maka penulis memberikan ceramah dan dislusi dengan materi yang sama di depan pejabat di jajaran Pemerintahan Daerah Musi Rawas pada tanggal 20 Januari 1992 di Lubuk Linggau,

Titik berat otonomi ini, permasalahannya tidak terlepas dari perwujudan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan landasan konstitusionalnya yang menjadi titik tumpu lagi pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. pada saat ini semakin semarak pembahasan tentang hari depan otonomi daerah di Indonesia oleh berbagai kalangan baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun organisasi-organisasi profesi dan media masa. Penulis sendiri sebagai peserta penataran

“ Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah” bagi pejabat Eselon I dan Wakil Gubernur se Indonesia (Angkatan IV) tanggal 4-8 Agustus 1991 di Jakarta. Penataran ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bersama Kantor Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.

Percepatan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH dan Undang –undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PEMBINAAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH, sedang bergulir didaerah. Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah seirig dengan itu tidak sedikit pula masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah.

Otonomi daerah sekarang merupakan fenomena politis yang sangat di butuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional, perubahan pola / sistem informasi global. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.



23. Tgl. 10-05-2023 “ PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”

Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal.

Pengarang: Muhammad Hasan, S.Pd.,M.P.D.

Dr.H. Muhammad Azis,M.Si.

Penerbit : CV. Nur Lina

ED 2, Cet. 1 , 2018 , XV + 503 HLM, 20 CM

ISBN. 978-609-51907-6-6

1. Menurut Mohammad Hatta (Daulat Ra'jat,20 September 1931)
“Bagi ra'jat itou jang ouetama karena ra'jat itoulah jantoung hati bangsa, dengan ra'jat itou jang menjadi oukouran tinggi rendahnya derajat kita.”
2. Menurut Moh. Hatta (kearang Indonesia merdeka, 1932)
” Asas kerakyaran mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan olehsegala jenis manusia

yang beradab, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri”

3. Menurut Joan Robinson (1962)

“ Kebenaran tidak menjadi benar kejahatan tidak lagi menjadi suatu yang jahat .semua tergantung pada apa yang sebenarnya dimaksudkan tetapi kalau demikian halnya maka kehidupan akan menjadi mustahil- untuk itu kita harus menentukan jalan keluar”

4. Menurut Teresa Lunati (1997)

“ *Homo Economicus* atau manusia ekonomi adalah agen individual yang berada dipusat teori ekonomi nonklasik (teori utilitarian, hedonis dan menitikpusatkan pada diri sendiri, yang rasionalis dan beretika individualis).”

Economic man atau manusia ekonomi bersifat materialistik tanpa emosi sama sekali dan merupakan manusia yang membuat perhitungan dengan kepala dingin ia merupakan seorang egosis yang rasional sedangkan *homo economicus* ‘ modern secara bengis bersikap rasional ia tamak dan oportunitik , ia dapat dipercaya dan ia tidak dapat mempercai orang lain.sebaliknya *homo ethicus*,sama sekali berbeda dan bahkanmerupakan kebalikan dari *homo economicus*, ia seorang artruistik dan individu yang kooperatif, jujur dan cenderung berbicara tentang kebenaran ia dapat dipercaya dan mempercayai orang lain.”

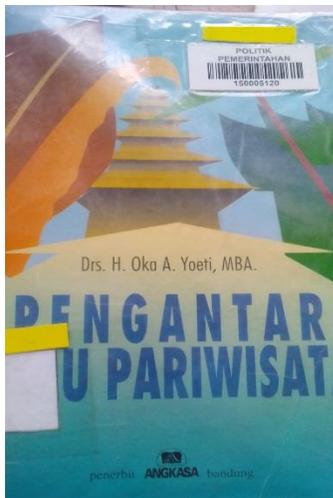
Secara khusus kepada Nabi Muhammad, SAW. Rosul Allah yang telah mencururkan keringat jihad dalam menda’wahkan kebenaran dan mengamalkan kebaikan, jihad dalam hal ini mengandung arti luas, tidak hanya berperang secara fisik melawan kejahatan, tetapi juga segala upaya yang telah dilakukan manusia demi kemaslahatan umat yang dilandasi keikhlasan dan hanya mengharap ridho ALLOH, SWT. Termasuk menulis dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat melalui buku ini.

Kurang lebih empat dekade sebagaimana terus dipraktekan hingga sekarang tidak menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan maupun standar hidup rakyat miskin didunia. Angka kemiskinan di dunia menunjukkan kondisi yang konstan bahkan cenderung meningkat, Demikian pula kualitas hidup penduduk miskin. Model pembangunan ortodox tidak mampu mengikis kondidi-kondisi buruk hidup rakyat miskin

seperti kekurangan gizi, keterbatasan pendidikan, serangan penyakit, dll. Model kehidupan ortodox bahkan ikut andil dalam semakin memburuknya kondisi penduduk miskin di dunia.

Fenomena tersebut yang melatar belakangi penulis untuk menerbitkan buku ini, dalam buku ini terbagi dalam 8 bagian /bab yang meliputi; pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi regional , pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan sumberdaya berbasis kekuatan lokal, pembangunan sektor pertanian, model dan strategi pemberdayaan ekonomi rakyat, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta pembangunan manusia dan modal manusia.penerbitan buku ini dimaksudkan untuk dapat menyajikan kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa, pengetahuan tentang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perspektif ekonomi lokal.

24. Tanggal 11-05-2023 “PENGANTAR ILMU PARAWISATA”



Pengarang : Drs. H. Oka A. Yoety, MBA.

Penerbit : Angkasa, Bandung 1996 (Revisi)

Cet 1, xxiv + 348 hlm

Dimensi , 21 cm

ISBN :979-404-491-1

Dalam buku ini penulis mencoba menguraikan apa dan mengapa pariwisata itu dan dijelaskan pula agak lebih mendalam konsep pariwisata sebagai suatu industri serta bentuk dan sifat produk yang dihasilkannya. Selain itu dijelaskan pula sarana –sarana pokok, sarana penunjang, dan pelengkap serta bentuk-bentuk organisasi Keparawisataan Nasional yang banyak dipakai oleh beberapa negara yang sudah maju industri pariwisatanya. Di bagian terakhir dibahas pula pemasaran terpadu (marketing mix) yang terakhir ini banyak disinggung oleh ahli-ahli pemasaran keparawisataan..di buku ini di jelaskan pula ada beberapa tabel dan daftar gambar, selanjut di setiap bab di jelaskan pula yaitu :

Bab I menjelaskan tentang sejarah perkembangan manusia, orang pertama sebagai traveler, asal mula hari libur, dari ini menuju hotel modern, travel agen pertama didunia, permulaan angkutan pariwisata.

Bab II yaitu Sejarah Keparawisataan DiIndonesia, yang menjelaskan lebih mendalam tentang. Masa penjajahan Belanda, Masa pendudukan Jepang, setelah Indonesia Merdeka, lahirnya yayasan turisme Indonesia (YTT), Lahirnya Dewan turisme Indonesia (DTT), Lirnya dewan turisme Indonesia (DEPARI), Babak baru dalam Keparawisataan Indonesia, pembentukan lembaga Pariwisata Indonesia (LPN), pengembangan pariwisata dalam PELITA.

Bab III tentang Motivasi Perjalanan Wisata. Yang menjelaskan secara mendalam diantaranya: Motivasi di Negara Asal Wisata, Proses pengembalian keputusan untuk perjalanan Wisata, motivasi umum dan motivasi khusus, konsep mempengaruhi motivasi perjalanan wisata, perkembangan keparawisataan internasional.

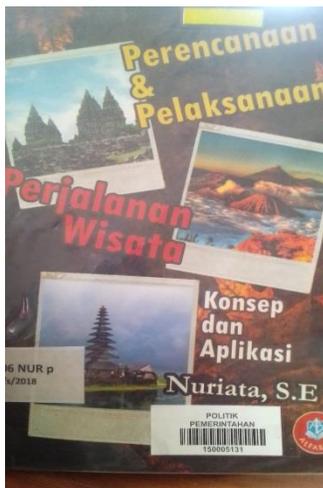
Bab IV tentang Dasar pengertian Pariwisata. Menjelaskan tentang keparawisataan sebagai suatu disiplin ilmiah, pengertian dan Defenisi pariwisata, pengertian dan definisi wisata, konsep pengertian industri pariwisata, konsep pengertian produk industri pariwisata, obyek dan atraksi wisata.

BAB V tentang prasarana dan sarana parawisata. Menjelaskan tentang macam dan jenis prasarana dan sarana, transportasi parawisata, kedudukan travel agent dan tour operator, akomodasi dan parawisata, parawisata dan catering industri.

Bab VI tentang Metode Perhitungan Aspek-aspek Parawisata. Yang menjelaskan tentang dasar-dasar perhitungan parawisata, menghitung tourist night, menentukan rata-rata pengeluaran parawisata, perencanaan penambahan kapasitas akomodasi hotel, perhitungan penerimaan devisa dari sektor parawisata.

Bab VII Tentang Organisasi Keparawisataan Nasional. Yang menjelaskan tentang bentuk organisasi keparawisataan nasional, struktur organisasi keparawisataan nasional, fungsi dan tugas organisasi keparawisataan nasional, faktor manusia organisasi keparawisataan, rekomendasi PBB tentang organisasi wisata nasional.

25." PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN WISATA Konsep dan Aplikasi".



Pengarang : Nurita, SE

Penerbit : CV. ALFABETA, Bandung

Cet : KE I Tahun 2014, (x + 126 hlm), 16 x 24 cm

ISBN : 978-602-289-082-9

Buku ini membahas perilaku organisasi atau pekerjaan yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan perjalanan wisata dari sebuah produk paket wisata yang telah dibeli konsumen, dalam hal ini wisatawan, oleh perusahaan perjalanan sebagai *tour organizer*. dan buku ini juga dapat menjadi panduan para pembaca dalam mempersiapkan penyelenggaraan perjalanan wisata. Tentunya dengan sifat wisata yang dinamis termasuk dinamika dalam bisnis wisata. Selain itu bahasan dalam buku ini diupayakan harus sejalan dan dapat mengikuti perubahan dinamis yang terjadi dalam lingkup bisnis wisata.

Untuk membuat *Standard Operation prosedsure* (SOP) bagi perubahan perjalaan Tour organizer, buku ini dapat dijadikan sebagai reperensi bagi pelaksanaan perjalanan.tentunya bagi yang terlibat dalam kegiatan bisnis parawisata apa saja, langkah-langkah oprasional dalam tulisan ini dapat dipergunakan untuk pencapaian pelaksanaan sebuah bisnis parawisata.

Kemajuan teknologi komunikasi pada perjalanan wisata terusberkembang dengan perubahan-perubahan yang cepat oprasional penanganan pelaksanaan perjalan wisata sangat erat kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi terutama dalam proses-proses penyelesaian oprasioanl yang penangann nya tidak secara manual lagi, tetapi melalui proses komputerisasi.

Dalam setiap bab dijelaskan pula yaitu :

Bab I tentang Pendahuluan yang membahas diantaranya , A. paket wisata sebagai produk, B. Perencanaan dan operasi pelaksanaan paket Wisata. C. Perjalan dan perjalan wisata.

Bab II menjelaskan tentang Tata niaga paket wisata ada dua diantaranya membahas tentang. a) Paket wisata sebagai komoditas. b) Jenis tour Organizer.

Bab III tentang Jenis Tour dalam perniagaan paket wisata diantaranya ; jenis tour berdasarkan wilayah perjalanan wista, jenis tour berdasarakan jumlah peserta, jenis tour berdasarkan usia wisatawan, jenis tour berdasarkan tipologi wisata, jenis tour berdasarakan waktu penyelenggaraan dalam satu hari, jenis kelas tour, jenis tour berdasarkan mode tranfortasi.

Di bab IV menjelaskan tentang Informasi Paket Wisata. diantaranya menjelaskan informasi harga tiket, penentuan harga paket wisata.

Bab V tentang Prosedur Penanganan Pelaksanaan Tour yang menjelaskan prosedur penanganan pelaksanaan tour, prosedur tahapan booking-registation dalam penanganan pelaksanaan tour.

Bab VI menjelaskan tentang Penyusunan Program dan perhitungan biaya tour. Antara lain yaitu : Penyusunan program perjalanan paket wisata, perhitungan biaya tour, perhitungan biaya hotel, jenis tarif hotel, biaya transportasi dan biaya komponen wisata yang lain.

Bab VII tentang Pembayaran Biaya tour dan Penanganan Dokumen Tour yang menjelaskan diantaranya penyelesaian pembayaran tour, penerimaan pembayaran tour, pembayaran kupon perjalanan/travel voucher, aplikasi travel voucher dalam paket wisata, persiapan dokumen perjalanan dalam perjalanan paket wisata.

Bab VIII Tentang Pertanggung jawaban dan asuransi paket wisata, yang menjelaskan diantaranya pertanggungjawaban tour organizer atas produk wisata,liabilitas perjalanan paket wisata, asuransi perjalanan paket wisata.

